

LAPORAN KINERJA OTORITAS JASA KEUANGAN 2017





Daftar Isi

3	Kata Pengantar
9	Bab 1 Tentang OJK
15	Bab 2 Kondisi Makroekonomi dan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
31	Bab 3 Kontribusi OJK untuk Pengembangan Sektor Jasa Keuangan dan Dukungan kepada Sektor Prioritas Pemerintah
67	Bab 4 Pelaksanaan Tugas Pokok OJK
81	Bab 5 Program Strategis OJK untuk Peningkatan Kapasitas Organisasi
101	Bab 6 <i>Outlook</i> Sektor Jasa Keuangan 2018
105	Bab 7 Fokus OJK 2018



Puji syukur kami panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada tahun 2017 dengan baik. Beberapa inisiatif telah kami lakukan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, tumbuh berkelanjutan, melindungi konsumen dan masyarakat serta berperan aktif dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan yang berkeadilan.

Sepanjang tahun 2017, ekonomi global terus melanjutkan pemulihannya, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini didukung dengan penguatan harga komoditas dan kinerja perdagangan global yang membaik. Kondisi makroekonomi domestik juga kondusif, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,07%, nilai tukar rupiah yang stabil dan inflasi berada pada level yang terjaga. Membaiknya fundamental ekonomi domestik juga didukung oleh persepsi pelaku pasar dan investor global yang tercermin dari meningkatnya peringkat investasi Indonesia dari *Standard and Poor's* menjadi *investment grade* serta peningkatan peringkat *Long Term Foreign* dan *Local Currency Issuer Default Rating* Indonesia dari Fitch Rating menjadi BBB dengan *outlook* stabil.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian domestik, stabilitas sektor keuangan juga terjaga dengan baik. Tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan (LJK) secara umum masih sangat solid dengan tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai untuk menyerap potensi risiko dan mendukung ekspansi usaha. Aktivitas intermediasi lembaga jasa keuangan juga menunjukkan perbaikan dengan kualitas kredit/pembiayaan yang terjaga pasca berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit. Perbaikan intermediasi perbankan ini juga diikuti dengan tren penurunan suku bunga.

Di samping itu, pasar modal domestik juga mencatatkan kinerja yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari IHSG yang meningkat sebesar 19,99%, menempatkan IHSG masuk dalam empat besar indeks bursa utama dengan kinerja terbaik di kawasan Asia-Pasifik. Pasar surat utang juga dalam tren menguat dengan volatilitas yang rendah. Selama tahun 2017, penghimpunan dana dari pasar modal tercatat Rp264 triliun dengan arus modal nonresiden yang masuk ke pasar saham dan surat utang tercatat sebesar Rp130,5 triliun. Perkembangan positif pasar modal ini sejalan dengan kebijakan OJK dalam mendorong penyediaan pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal.

Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan, selama tahun 2017 OJK menerbitkan 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 55 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur sektor jasa keuangan. POJK yang diterbitkan meliputi 23 peraturan di sektor perbankan, 48 peraturan di sektor pasar modal, 7 peraturan di sektor industri keuangan non bank, dan satu peraturan tentang penyidikan sektor jasa keuangan. Mekanisme pengawasan Industri Jasa Keuangan terus diperkuat, baik pada tingkat sektoral maupun terintegrasi, terutama dengan lebih memanfaatkan teknologi informasi.





Kata Pengantar

Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya di bidang pengaturan dan pengawasan, OJK juga fokus mengembangkan sektor jasa keuangan untuk lebih dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan memberikan dukungan akses Keuangan kepada sektor prioritas pemerintah, di antaranya adalah sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan perikanan serta UMKM. Disamping itu, OJK juga memfasilitasi berbagai program pemerintah seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bansos Non-Tunai, Kredit Ultra Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan. Keseluruhan inisiatif ini akan dimonitor oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terus lebih dioptimalkan dan diperluas keberadaanya.

Dalam memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), OJK memperkenalkan Program KUR Klaster di mana penyaluran kredit diberikan kepada sektor produktif dengan pendekatan klaster atau kelompok debitur. Selain mendapatkan kredit, setiap klaster akan mendapatkan pembinaan dan dihubungkan ke *off-taker* untuk bantuan pemasaran produknya. Dengan demikian diharapkan penyaluran KUR dapat lebih diakselerasi untuk menjangkau masyarakatan yang lebih luas dan juga lebih efektif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Melengkapi berbagai upaya dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, OJK juga memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pesantren dengan *platform* LKM Syariah. Melalui Bank Wakaf Mikro ini, msyarakat akan mendapatkan pembiayaan tanpa agunan dengan margin yang relatif kecil atau setara dengan 3% serta diberikan juga pendampingan. Pengembangan Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan mikro melalui terbukanya akses keuangan dan pemberian pendampingan.

Seiring dengan perkembangan *financial technology* (Fintech) dan layanan keuangan digital yang semakin pesat, pada prinsipnya OJK mendukung perkembangan Fintech sepanjang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dilengkapi dengan tata kelola yang baik serta mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Kerangka pengaturan yang telah dan akan diterbitkan serta *Roadmap Fintech* akan mengacu pada prinsip ini.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi OJK, infrastruktur dan mekanisme kerja terus kami kembangkan. Selama tahun 2017, OJK mengembangkan infrastruktur berbasis teknologi untuk memudahkan proses pengawasan dan mempercepat proses perizinan seperti pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care* – FCC). OJK juga merevitalisasi *Contact Center* OJK, yaitu menjadi Kontak OJK 157 agar lebih simpel dan mudah diingat yang dilengkapi dengan penambahan kapasitas infrastruktur layanan.

OJK senantiasa memastikan pelayanan prima kepada berbagai pemangku kepentingan dengan melakukan pengembangan kapasitas internal organisasi secara berkesinambungan. Kegiatan yang



dilakukan antara lain dengan mengedepankan sistem teknologi informasi dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, memenuhi kebutuhan jaringan kantor, menjalin hubungan kelembagaan dengan berbagai instansi domestik maupun internasional serta penguatan tata kelola organisasi.

Mewakili seluruh Anggota Dewan Komisioner, kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama tahun 2017. Penghargaan yang tulus juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Dengan dukungan berbagai pihak, OJK akan berupaya untuk terus memperbaiki kinerjanya sehingga ke depannya industri jasa keuangan dapat lebih optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

**Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan**



Wimboh Santoso, Ph.D



Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Anggota Dewan Komisiner OJK



Pada 20 Juli 2017, Ketua Mahkamah Agung, H. Muhammad Hatta Ali mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK Periode 2017-2022 sesuai Keppres No. 87/P.2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pelantikan ini, maka tujuh Anggota Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022 akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang OJK No.21/2011 tentang OJK bersama.

Pada hari yang sama, OJK mengadakan acara serah terima jabatan ADK periode 2012-2017 kepada ADK periode 2017- 2022. Anggota Dewan Komisiner periode 2017 – 2022 menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Anggota Dewan Komisiner Periode 2012 – 2017 karena sejak OJK berdiri telah memberikan manfaat kepada industri keuangan, mendapatkan pengakuan dunia internasional serta ikut mendukung program pemerintah.



Anggota Dewan Komisiner OJK

Periode 2017-2022



- | | |
|---|--|
| 1. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D
Ketua Dewan Komisiner | 6. Drs. Ahmad Hidayat, Akt.C.A MBA
Ketua Dewan Audit |
| 2. Ir. Nurhaida, MBA
Wakil Ketua Dewan Komisiner sebagai
Ketua Komite Etik | 7. Tirta Segara, SE., MBA
Anggota Dewan Komisiner
Membidangi Edukasi dan Perlindungan
Konsumen |
| 3. Heru Kristiyana SH., MM
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan | 8. Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Ph.D,
Akt., QIA, CA, Cfra
Anggota Dewan Komisiner Ex-Officio
Kementerian Keuangan |
| 4. Ir. Hoesen, MM
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal | 9. Mirza Adityaswara, SE, M.App. Fin
Anggota Dewan Komisiner Ex-Officio
Bank Indonesia |



Halaman ini sengaja dikosongkan



Tentang **OJK**



Halaman ini sengaja dikosongkan



MISI OJK

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

VISI OJK

1. Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya
2. Mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat





NILAI-NILAI STRATEGIS OJK	MAKNA NILAI	PERILAKU UTAMA
1 INTEGRITAS 	Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur dan dipercaya 2. Bijak 3. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan
2 PROFESIONALISME 	Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar berkelanjutan 2. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan 3. Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.
3 SINERGI 	Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghargai 2. Berkomunikasi secara efektif 3. Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah
4 INKLUSIF 	Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai keberagaman 2. Berperilaku adil 3. Partisipatif, konstruktif, fasilitatif, dan edukatif.
5 VISIONER 	Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (<i>forward looking</i>) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (<i>out of the box thinking</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru 2. Melihat jauh ke depan 3. Menginspirasi dan mendukung perubahan

Halaman ini sengaja dikosongkan

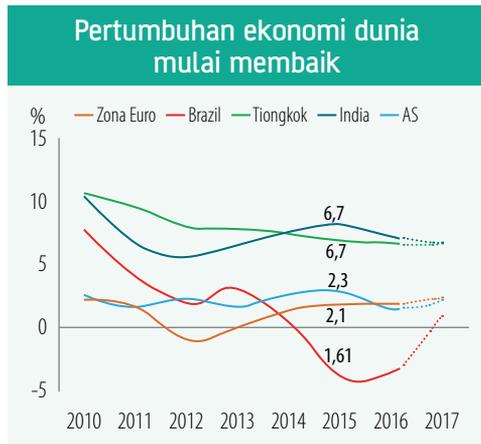


Kondisi Makroekonomi
dan Perkembangan
**Sektor Jasa Keuangan
Indonesia**



Halaman ini sengaja dikosongkan

Pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Prospek ke depan cenderung membaik.



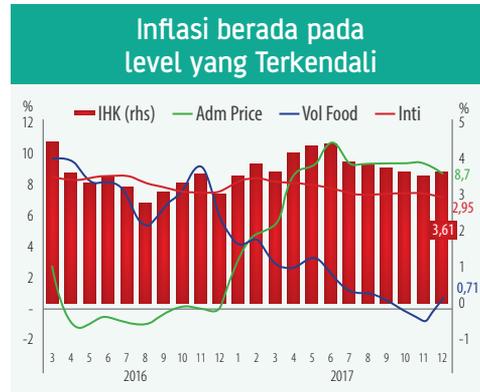
Pertumbuhan 2018 diproyeksikan membaik

Lembaga	2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018
THE WORLD BANK	2,4%	2,7%	2,9%
INTERNATIONAL MONETARY FUND	3,2%	3,6%	3,7%
OECD	3,1%	3,6%	3,7%

Sumber: Bloomberg, CEIC, IMF, Bank Dunia, OECD

Stabilitas Makroekonomi Domestik Terjaga

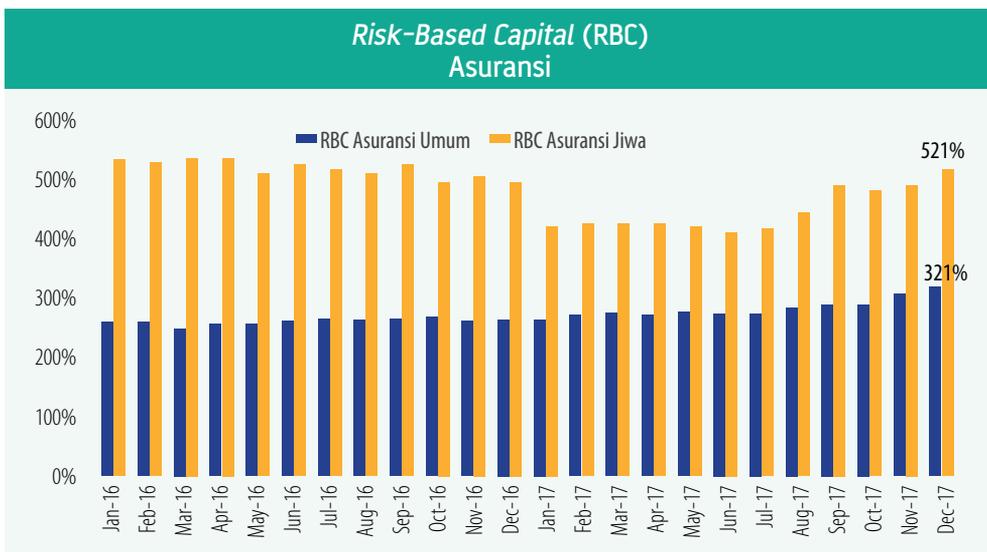
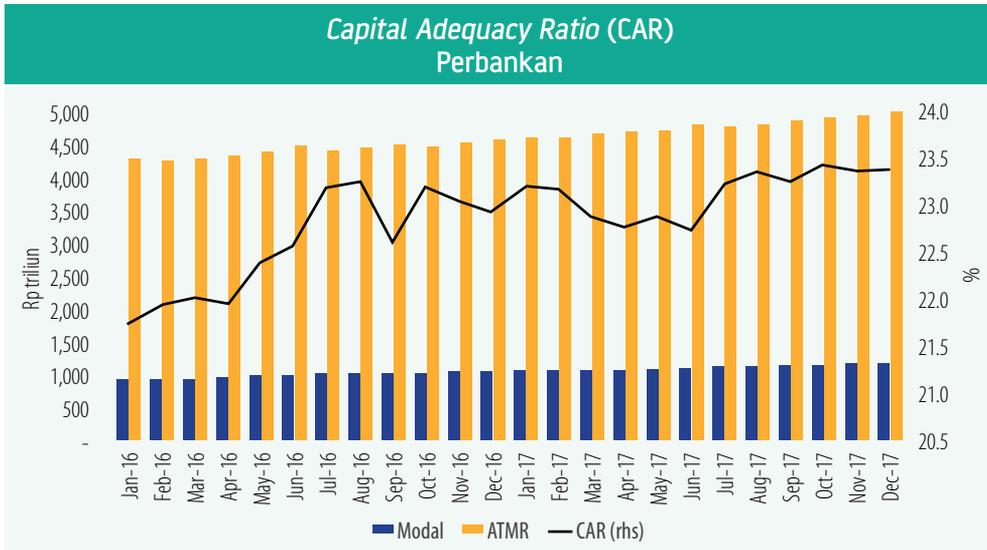
Fundamental ekonomi secara umum masih terjaga, didukung oleh persepsi pelaku pasar terhadap ekonomi domestik yang positif.



Pada 2017, Standard and Poor's menaikkan peringkat Indonesia menjadi *investment grade*. Fitch Ratings meningkatkan kembali peringkat Indonesia menjadi BBB dengan *outlook* stabil.

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Thomson Reuters

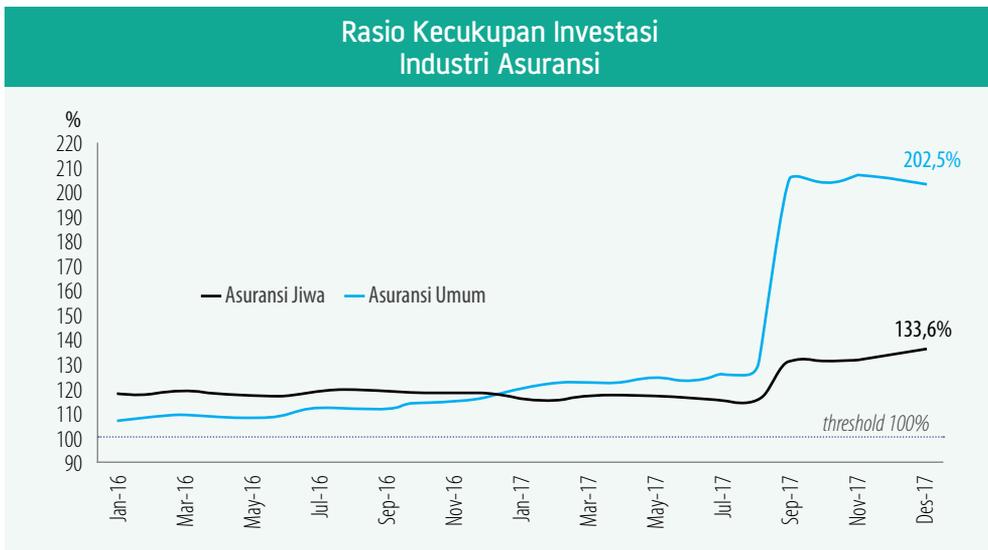
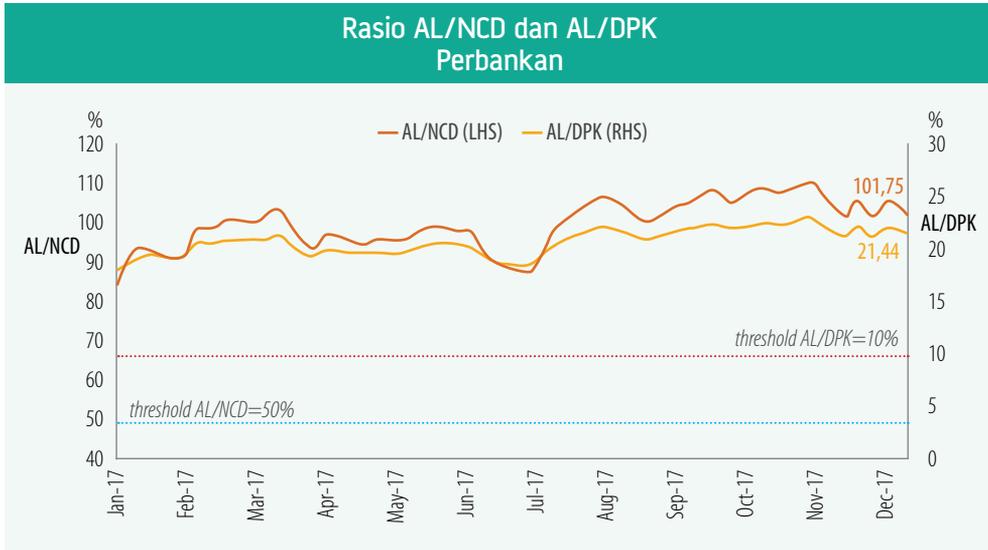
Permodalan LJK terjaga pada level yang cukup tinggi untuk mendukung ekspansi kredit dan menyerap potensi peningkatan risiko.



Sumber: OJK

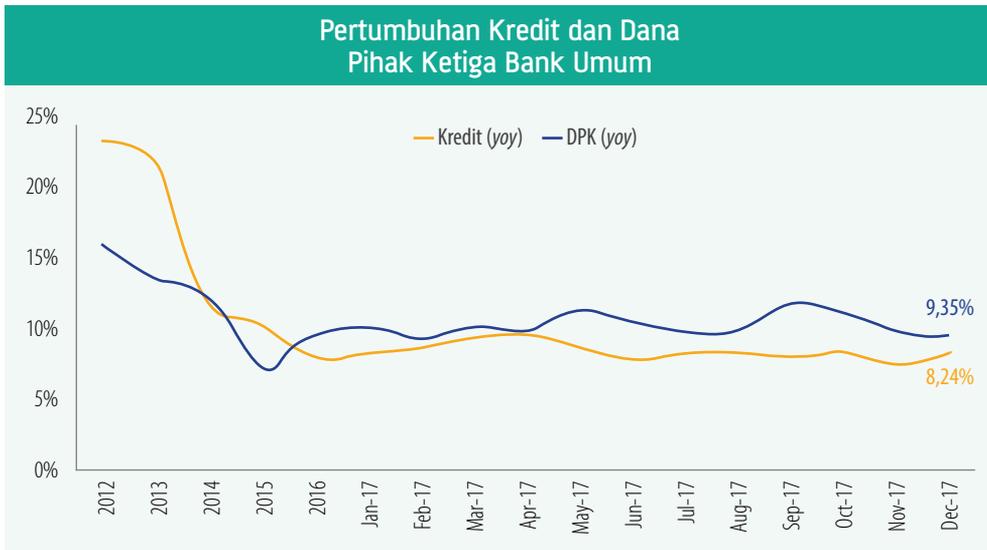
Likuiditas pada Kondisi yang Ample

Likuiditas LJK secara umum juga dalam kondisi memadai, dan mendukung untuk ekspansi lebih lanjut



Sumber: OJK

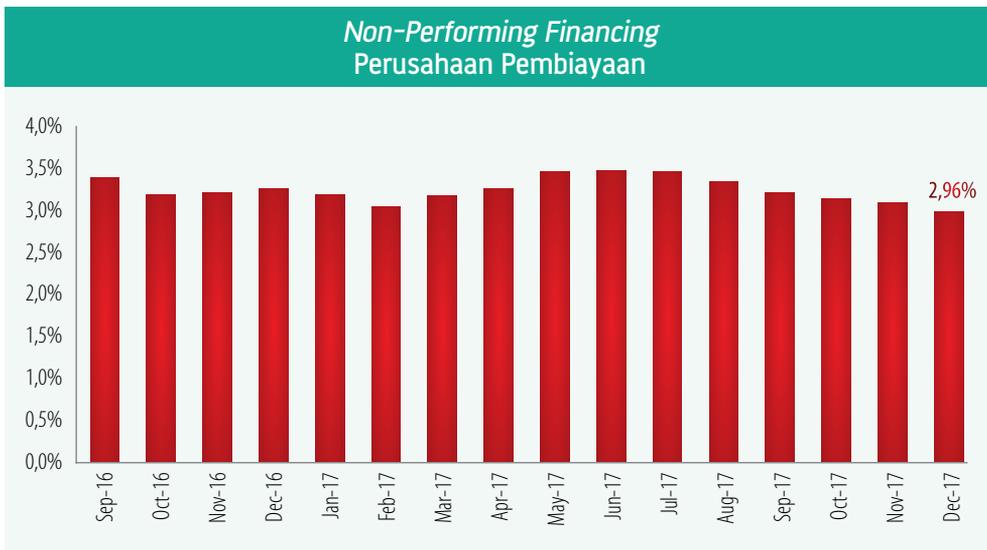
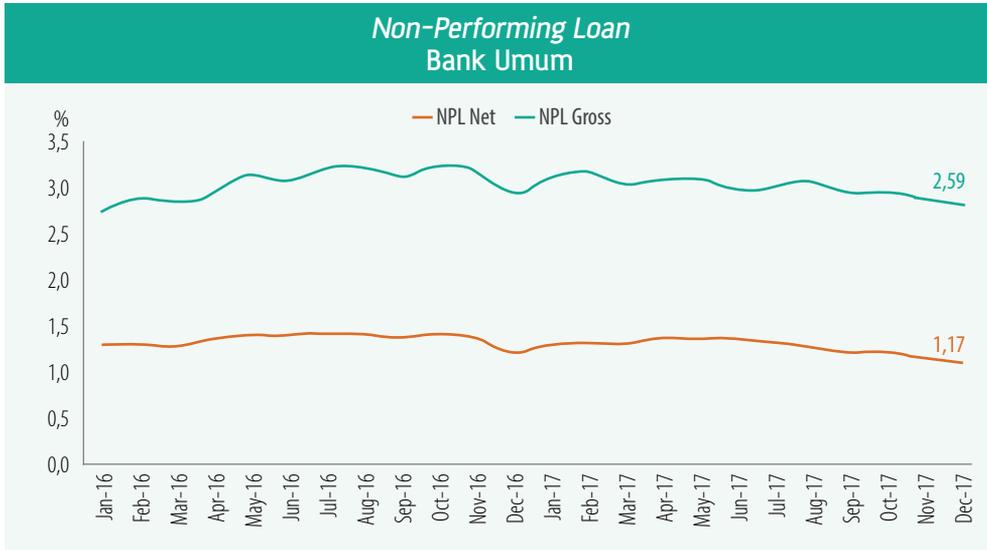
Intermediasi masih tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi domestik. Ke depan kinerja intermediasi diperkirakan membaik, terlebih dengan permodalan dan likuiditas LJK yang memadai.



Sumber: OJK



Rasio NPL dan NPF lembaga keuangan tetap terjaga di bawah *threshold* 5%. Pasca-berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit, risiko kredit Bank Umum tetap *manageable*.



Sumber: OJK

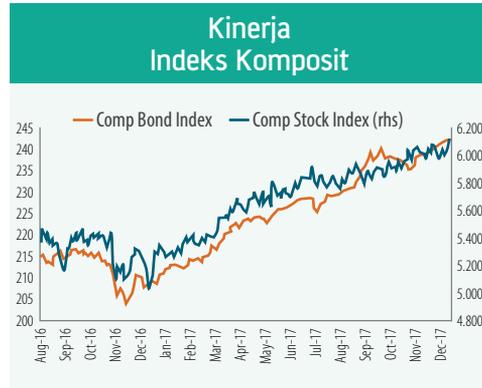
Pasar modal domestik melanjutkan kecenderungan menguat sejalan dengan prospek ekonomi global dan domestik.

Pasar saham & surat utang dalam tren menguat, dengan volatilitas yang relatif rendah.

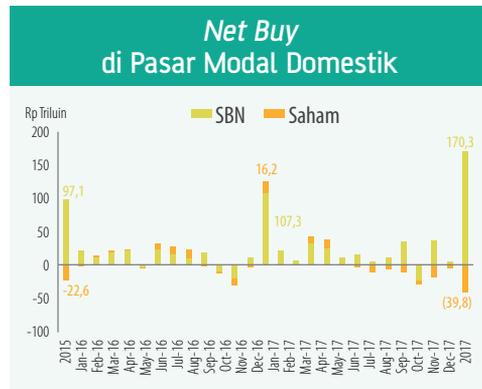
IHSG melanjutkan tren penguatan. Tahun 2017 IHSG tumbuh 19,99% *yoy*, salah satu indeks berkinerja terbaik di kawasan.



Sumber: Bloomberg, DJPPR



Secara keseluruhan investor nonresiden mencatat *net buy* di pasar modal domestik, terutama dari pasar SBN

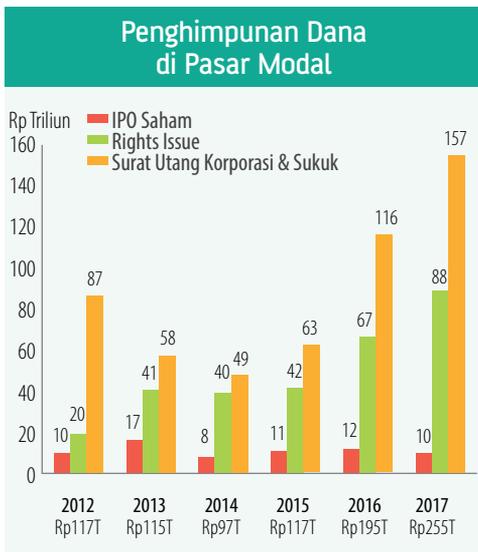


Pemanfaatan Pasar Modal Meningkat

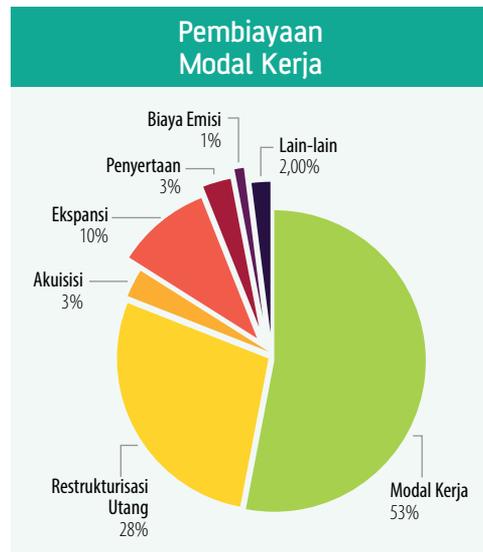
Pasar modal domestik diarahkan untuk berperan semakin penting sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Pemanfaatan pasar modal oleh korporasi meningkat signifikan pada tahun 2016 dan 2017.

Sepanjang 2017, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp255 triliun, meningkat 30,27% dibandingkan tahun sebelumnya.

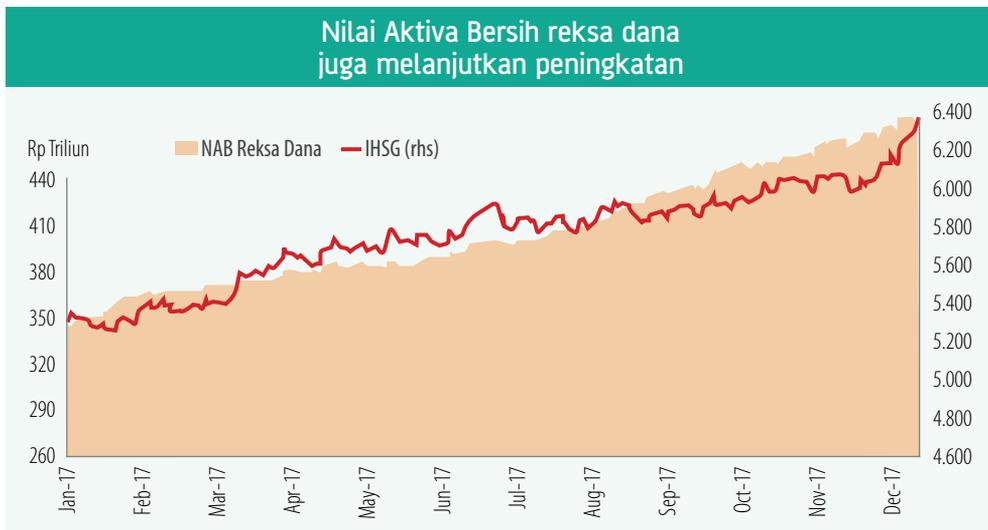
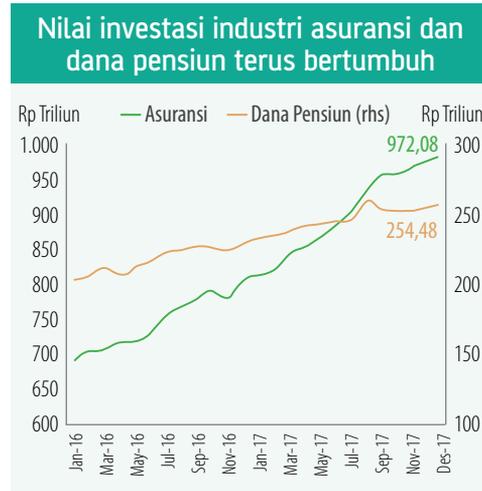
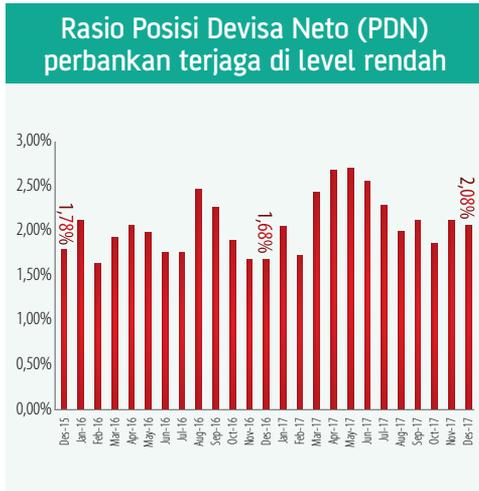
Penghimpunan dana di pasar modal pada tahun 2017 sebagian besar digunakan untuk pembiayaan modal kerja.



Sumber: OJK



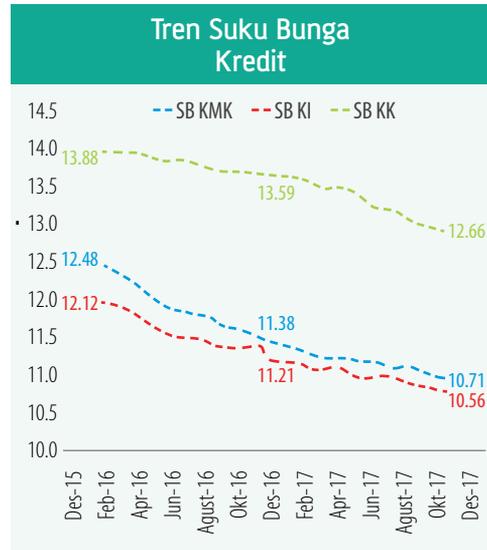
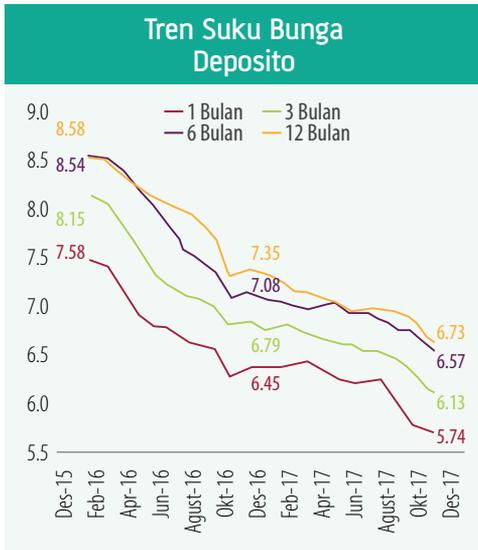
Dengan tren penguatan di pasar keuangan dalam negeri tahun ini, risiko pasar lembaga jasa keuangan cenderung rendah. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan terjaga di level rendah. Nilai investasi industri asuransi dan dana pensiun terus bertumbuh dan Nilai Aktiva Bersih reksa dana juga melanjutkan peningkatan.



Sumber: OJK

Trend Suku Bunga Menurun

Penurunan suku bunga 7 days repo rate memberikan pengaruh positif pada penurunan suku bunga deposito dan kredit dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: OJK

Indikator Sektor Jasa Keuangan Perbankan

Perbankan (Bank Umum)



Aset (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
5.615	6.133	6.730	▲ 7.387	



Kredit (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
3.674	4.058	4.337	▲ 4.738	



DPK (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
4.114	4.413	4.837	▲ 5.289	



Pertumbuhan Kredit (ytd) (%)				
2014	2015	2016	2017	
11,58	10,44	7,87	▲ 8,24	



LDR (%)				
2014	2015	2016	2017	
89,30	91,95	90,50	89,56	



NPL Gross (%)				
2014	2015	2016	2017	
2,16	2,49	2,93	▼ 2,59	



CAR (%)				
2014	2015	2016	2017	
19,34	21,16	22,69	▲ 23,13	

Perbankan (Bank Umum Konvensional)



Perbankan
(Bank Umum
Syariah & Unit
Usaha Syariah)



Aset (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
5.410	5.919	6.476	▲ 7.099	



Kredit (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
3.526	3.904	4.200	▲ 4.548	



Aset (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
272	296	357	▲ 424	



Pembiayaan (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
199	213	248	▲ 286	



DPK (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
3.944	4.238	4.630	▲ 5.051	



Pertumbuhan Kredit (%)				
2014	2015	2016	2017	
11,66	10,71	7,58	▲ 8,30	



DPK (Rp T)				
2014	2015	2016	2017	
218	231	279	▲ 335	



Pertumbuhan Pembiayaan (%)				
2014	2015	2016	2017	
15,44	6,86	16,44	▲ 15,20	



CAR (%)				
2014	2015	2016	2017	
19,5715	21,39	22,93	▲ 23,36	



BOPO (%)				
2014	2015	2016	2017	
76,29	81,49	82,22	▼ 78,64	



CAR (%)				
2014	2015	2016	2017	
15,74	15,02	16,63	▲ 17,91	



BOPO (%)				
2014	2015	2016	2017	
94,16	94,38	93,63	▼ 89,62	



NPL Gross (%)				
2014	2015	2016	2017	
2,04	2,49	2,86	▼ 2,50	



LDR (%)				
2014	2015	2016	2017	
89,42	92,11	90,70	90,04	



NPF (%)				
2014	2015	2016	2017	
4,33	4,34	4,16	▼ 3,87	



FDR (%)				
2014	2015	2016	2017	
91,50	92,14	88,78	85,31	

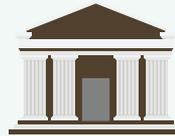


Indikator Sektor Jasa Keuangan Perbankan

BPR



BPRS



DPK (Rp T)			
2014	2015	2016	2017
58,76	67,27	75,73	84,86



Kredit (Rp T)			
2014	2015	2016	2017
68,39	74,98	81,68	89,48



DPK (Rp T)			
2014	2015	2016	2017
4,02	4,80	5,67	6,99



Pembiayaan (Rp T)			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,77	6,59	7,76



Pertumbuhan Kredit (%)			
2014	2015	2016	2017
7,51	9,64	9,19	9,55



Aset (Rp T)			
2014	2015	2016	2017
89,99	101,71	113,50	125,95



Aset (Rp T)			
2014	2015	2016	2017
6,57	7,74	9,15	10,84



FDR (%)			
2014	2015	2016	2017
124,24	120,06	114,40	111,12



NPL Gross (%)			
2014	2015	2016	2017
4,98	5,57	5,83	6,15



CAR (%)			
2014	2015	2016	2017
22,38	21,90	22,77	22,95



BOPO (%)			
2014	2015	2016	2017
89,48	88,09	87,09	85,34



NPF Gross (%)			
2014	2015	2016	2017
7,77	8,20	8,63	9,68

Indikator Sektor Jasa Keuangan Pasar Modal

Pasar Modal



Pasar Modal Syariah



 Nilai Emisi (Rp T)				 Jumlah Emisi (Penawaran Umum)				 JII (Jakarta Islamic Index)				 ISSI			
2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
97	117	195	254	92	85	122	161	691,04	603,35	694,13	759,07	168,64	145,06	172,08	189,86
 Jumlah Emiten Baru				 NAB RD (Rp T)				 Sukuk Korporasi (Rp T)				 Kapitalisasi JII (Rp T)			
2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
25	22	21	46	241	272	339	457	7,12	9,9	11,9	15,74	1,94	1,73	2,04	2,28
 IHSG				 Jumlah RD				 Kapitalisasi ISSI				 NAB Reksa Dana Syariah (Rp T)			
2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
5.226,95	4.593,01	5.296,71	6.355,65	894	1.091	1.425	1.777	2,94	2,60	3,17	3,70	11,24	11,02	14,91	28,31
 Kapitalisasi Pasar (Rp T)				 NAB RDPT (Rp T)				 Sukuk Negara (Rp T)							
2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
5.228,04	4.872,7	5.759,38	7.052,39	28,07	19,77	17,64	18,30	206,10	296,07	411,37	555,50				





Indikator Sektor

Jasa Keuangan industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Industri Keuangan Non Bank



Industri Keuangan Non Bank Syariah



Aset IKNB (Rp T)

2014	2015	2016	2017
1.560	1.664	1.942	2.208,50



Densitas Asuransi (Rp Juta)

2014	2015	2016	2017
0,94	1,11	1,26	1,54



Aset IKNB Syariah (Rp T)

2014	2015	2016	2017
58,38	64,89	88,68	99,13



Aset Asuransi Syariah (Rp T)

2014	2015	2016	2017
22,37	26,52	33,24	40,52



Investasi Dana Pensiun (Rp T)

2014	2015	2016	2017
180,4	200,3	228,8	254,48



Piutang Pembiayaan (Rp T)

2014	2015	2016	2017
366,2	363,3	387,5	414,84



Piutang Pembiayaan Syariah (Rp T)

2014	2015	2016	2017
18,39	20,23	33,07	28,64



Aset LK Khusus Syariah (Rp T)

2014	2015	2016	2017
11,86	15,51	18,43	22,74



Aset Dana Pensiun (Rp T)

2014	2015	2016	2017
187,52	206,59	236,29	260,96



Penetrasi Asuransi

2014	2015	2016	2017
2,24%	2,45%	2,61%	3,19%



Investasi Asuransi & LKM Syariah (Rp T)

2014	2015	2016	2017
19,46	23,07	28,81	35,31



Aset Lembaga Pembiayaan Syariah (Rp T)

2014	2015	2016	2017
24,15	22,83	36,94	34,48



Aset Pembiayaan Ekspor (Rp T)

2014	2015	2016	2017
60,50	84,97	100,67	110,90



Ourstanding Penjaminan (Rp T)

2014	2015	2016	2017
95,82	101,72	133,53	210,57



Aset Dana Pensiun Syariah (Rp T)

2014	2015	2016	2017
N.A	N.A	N.A	1,29





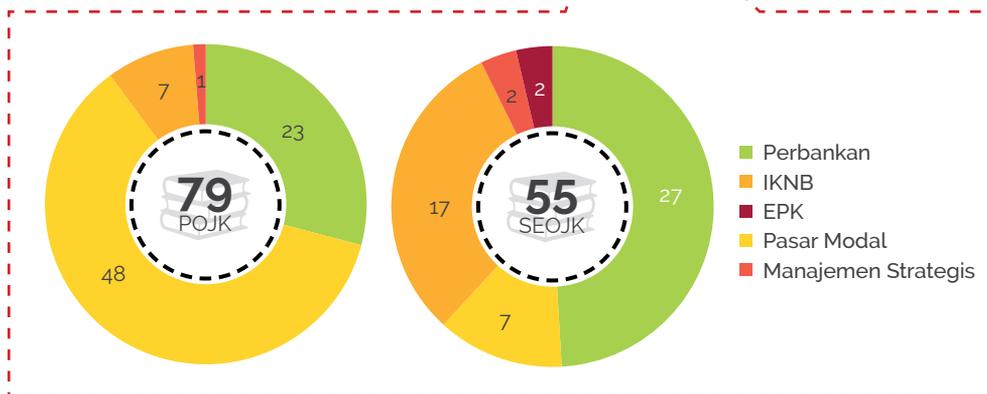
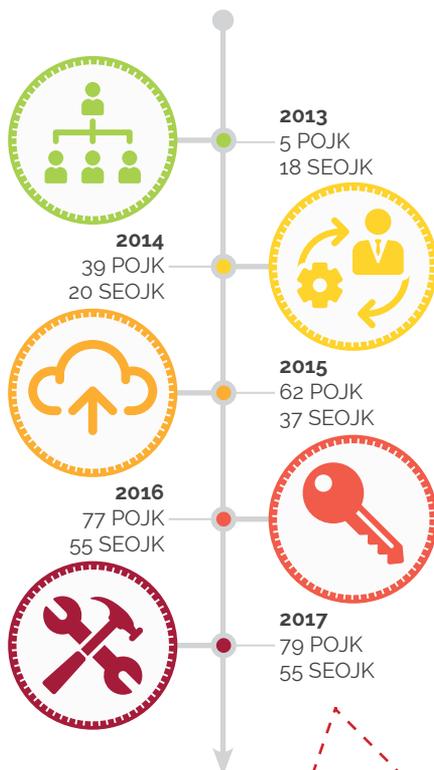
Bab 3

Kontribusi OJK Untuk
Pengembangan
**Sektor Jasa Keuangan dan
Dukungan Kepada Sektor
Prioritas Pemerintah**



Halaman ini sengaja dikosongkan

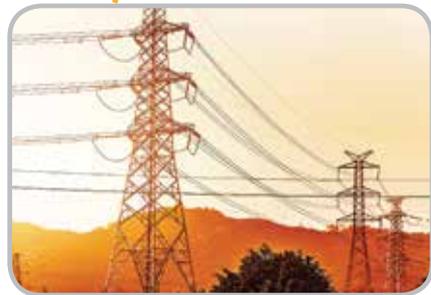
Selama periode 2017, OJK menerbitkan **79 POJK** dan **55 SEOJK** yang mengatur sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB serta EPK:



Mendorong Pembiayaan Infrastruktur



Sektor Infrastruktur



Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

4 EBA-SP dengan total nilai sekuritisasi Rp2,24 triliun

▲ 53,42% (ytd)



Penawaran Umum Sektor Infrastruktur

23 Penawaran Umum yang dilakukan oleh 19 Emiten dengan total nilai emisi

Rp38,90 triliun

▲ 72,96% (ytd)



KIK-EBA

2 KIK-EBA terkait infrastruktur dengan total nilai sekuritisasi Rp6,00 triliun

Pembiayaan Infrastruktur Obligasi Daerah dan *Green Bonds*



OJK menerbitkan Peraturan OJK mengenai obligasi daerah dan *Green Bonds* (Keuangan Berkelanjutan). Peraturan tersebut diterbitkan guna mendukung program pemerintah, terutama pembangunan Infrastruktur.



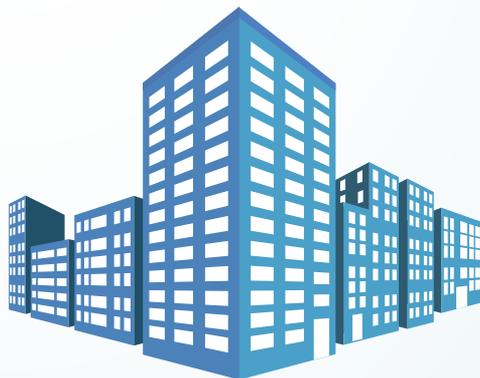
Obligasi Daerah

Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik memerlukan alternatif instrumen pendanaan non APBD dari Pasar Modal. Salah satu model pembiayaan melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Kontribusi OJK dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Dalam penerbitan Obligasi Daerah diperlukan sinergi antara OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Daerah untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Aspek tata kelola APBD menjadi perhatian karena kepercayaan investor tergantung pada bagaimana Pemerintah Daerah mengelola APBD dan memanfaatkan dana hasil penerbitan Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah.



Green Bonds

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yaitu mewujudkan Indonesia asri dan lestari antara lain melalui pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, serta komitmen Indonesia dalam mendukung upaya adaptasi perubahan iklim, OJK menerbitkan peraturan mengenai Efek Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bonds*). Penerbitan peraturan tersebut merupakan salah satu implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. *Roadmap* tersebut mempunyai fokus pada peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup, peningkatan *demand* (permintaan) bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup, dan peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan di Pasar Modal





Mendorong Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan



Sektor Pertanian



Proteksi Petani dan Lahan Pertanian

1.631.350 orang petani

8,51% (ytd)

993.100,12 hektar lahan pertanian

24,65% (ytd)



Perlindungan Hewan Ternak

92.176 ekor sapi

realisasi sebesar Rp18,43 miliar



Sektor Perikanan dan Kelautan



Kredit Sektor Kelautan dan Perikanan

Rp27,8 triliun

14,76% (ytd)



Asuransi Kerangka Kapal

1.396 kapal



Proteksi Nelayan

500.000 orang nelayan



Asuransi Budidaya Udang

Launching Desember 2017

Target Awal 3.300 Ha tambak udang
di 14 Provinsi





Untuk mengakselerasi pembiayaan di sektor pertanian, OJK meluncurkan program Akselerasi Keuangan Sinergi dan Inklusi – Pangan (Aksi Pangan). Aksi Pangan ini merupakan program inisiatif OJK dan Kementerian Pertanian, bersinergi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Koperasi & UKM, Asosiasi dan Industri Jasa Keuangan. Fokus utama Program Aksi Pangan yakni peran industri jasa keuangan; skema pembiayaan rantai nilai; dan peran inovasi pangan melalui *FinTech/E-commerce*.

Tujuan Program AKSI PANGAN:

- 1 Peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- 2 Meningkatkan akses masyarakat petani terhadap jasa keuangan yang lebih luas
- 3 Pemahaman SJK terhadap bisnis sektor pertanian dan sektor pangan lebih baik
- 4 Memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil
- 5 Menambah jumlah lapangan kerja
- 6 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Skema Pembiayaan AKSI Pangan



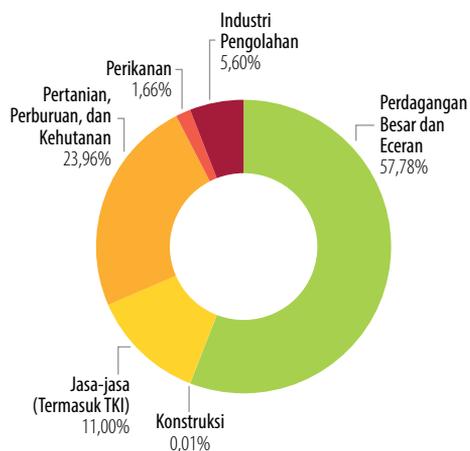
Realisasi KUR 2017 mencapai Rp96,7T atau 90% dari target penyaluran 2017. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR terkonsentrasi di Sektor Perdagangan (55,90%) dan Pertanian (23,96%). Berdasarkan lokasi KUR masih terpusat di Jawa Tengah (17,74%).

Realisasi KUR – Lembaga Penyalur

No	LJK	Realisasi (Rp T)				Realisasi (%)			
		Mikro	Ritel	TKI	Total	Mikro	Ritel	TKI	Total
1	Bank	65.16	31.29	0.326	96.78	93.03%	88.85%	30.05%	91.00%
2	Perusahaan Pembiayaan	0.00	*	*	0.00	0.33%	*	*	0.33%
3	Koperasi	0.01	*	*	0.01	18.00%	*	*	18.00%
Total		65.17	31.29	0.33	96.79	92.58%	88.85%	30.05%	90.71%

*) Perusahaan Pembiayaan dan Koperasi sampai 2017 belum menyalurkan KUR Ritel dan TKI

Realisasi KUR – Sektor Ekonomi



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Realisasi KUR - Provinsi



Penyaluran KUR Berdasarkan Wilayah Tahun 2017 (Rp Triliun)

1. Jawa (52,64%)
2. Sumatera (19,58%)
3. Sulawesi (10,23%)
4. Bali & Nusa Tenggara (6,59%)
5. Kalimantan (5,69%)
6. Maluku & Papua (2,00%)

Laku Pandai



Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi

	2016	2017
Jumlah Agen	276.369 Agen	740.121 Agen
Jumlah Rekening BSA	3.700.215 nasabah	13.645.396 nasabah
Total Saldo BSA	Rp0,216 triliun	Rp1,03 triliun

SimPel Simpanan Pelajar

SimPel (Simpanan Pelajar)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Edukasi Pasar Modal Terpadu



Peningkatan jumlah investor ini sebagai hasil dari kampanye yang masif yang dilakukan oleh OJK dengan BEI dan LJK Pasar Modal melalui program (1) Yuk Menabung Saham, (2) Sahamku Reksa Danaku, (3) Sosialisasi Pasar Modal terpadu dan (4) Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal

	2016	2017	Pertumbuhan
Jumlah SID Saham	364.465	628.491	72.44%
Jumlah SID Reksa Dana	444.946	622.545	39.91%
Jumlah SID SBN	105.690	128.474	21.56%

Note: Data SID belum memisahkan per jenis efek



Layanan Keuangan Mikro

Laku Mikro merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat.

Sampai 2017 jumlah outlet Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) sebanyak 9.015 (+9% ytd)

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)



SNLKI menjadi pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan/program literasi dan inklusi keuangan.

TUJUAN SNLKI (Revisit 2017)

1. Menyempurnakan SNLKI tahun 2013 sesuai dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016.
2. Mengakomodasi berbagai perubahan dan perkembangan baru terkait dengan literasi dan inklusi keuangan.
3. Mengakselerasi pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat

SNLKI 2013



SNLKI (Revisi 2017)



Mendukung Pertumbuhan UMKM, Ekonomi Daerah Dan Ekonomi Kreatif



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Pembentukan TPAKD bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Telah dibentuk **61 TPAKD** baik ditingkat Provinsi/Kabupaten maupun Kota



Optimalisasi Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

Peningkatan akses pembiayaan di daerah khususnya bagi UMKM dan koperasi dengan capaian *outstanding* sebesar **Rp173,74 triliun**.



Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

Gerai PELAKU merupakan sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM yang terdapat di KR/KOJK. Telah terdapat **19 Gerai PELAKU** yang ada di kantor OJK di daerah. Selain itu, telah diimplementasikan Sistem PELAKU di **8 (delapan) KR/KO**.



Revitalisasi Modal Ventura

Pendanaan kepada UMKM khususnya *start-up business* yang bergerak di sektor ekonomi kreatif dengan total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura sebesar **Rp6,71 triliun**.



Transformasi BPD

Program Transformasi BPD bertujuan meningkatkan peran BPD sebagai katalisator pembangunan daerah. Enam strategi Transformasi BPD yaitu: (1) Pengembangan Produk; (2) Pengelolaan Layanan; (3) Pengembangan Pemasaran; (4) Pengelolaan Jaringan; (5) Pengelolaan Portofolio; dan (6) Penguatan Likuiditas dan Permodalan.



Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Mendorong Sinergi Industri Perbankan dan IKNB untuk Pembiayaan ekspor dan UMKM; dengan total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp5,39 triliun**.



Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Dan Perizinan

OJK juga mengembangkan Infrastruktur pengawasan dan perizinannya yang bertujuan untuk memudahkan menciptakan kestabilan sektor jasa keuangan, antara lain:

Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Sistem Informasi yang memfasilitasi proses perizinan produk dan jasa keuangan lintas bidang dilakukan melalui satu pintu sehingga mempersingkat proses

Bancassurance 101 hari menjadi 19 hari kerja	AP & KAP dalam waktu 20 hari kerja
APERD dari 105 hari menjadi 19 hari kerja saja	Sukuk Obligasi 105 hari menjadi 22 hari kerja





Pelaporan dilakukan secara terpusat

- Tidak perlu menyediakan SDM di setiap kantor cabang
- Kemudahan pelapor dalam melakukan kontrol terhadap kualitas data
- Kemudahan OJK dalam melakukan monitoring pelaporan
- Kemudahan OJK dalam memberikan layanan bantuan/*helpdesk*



Cakupan data lebih lengkap

- Cakupan Pelapor lebih luas, yaitu seluruh LJK.
- Terdapat tambahan data, antara lain penghasilan debitur, data pasangan debitur, informasi kredit program pemerintah.



Jaringan komunikasi data dapat menggunakan internet dan ekstranet sehingga biaya lebih murah



Validasi laporan dan permintaan Informasi Debitur lebih cepat



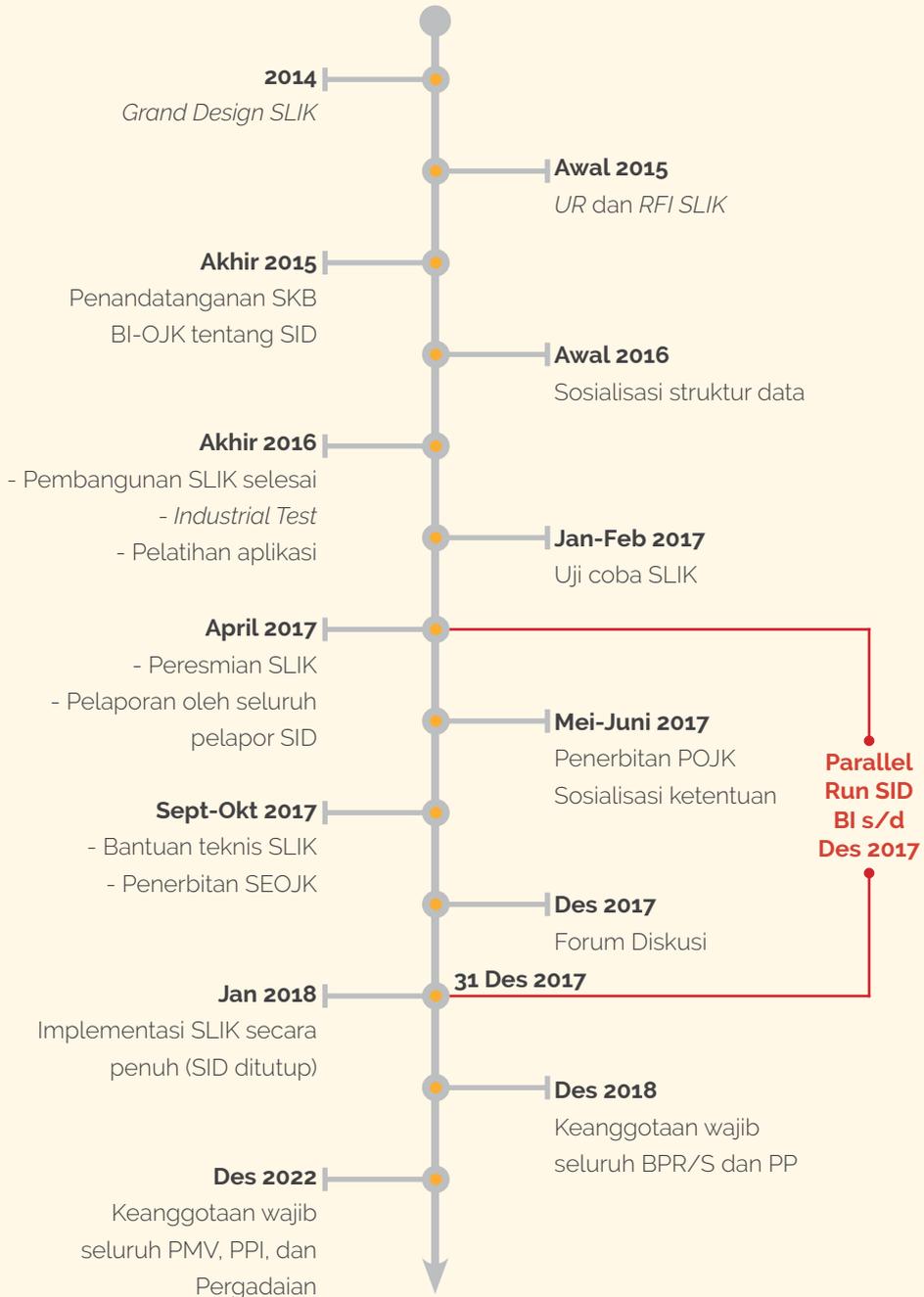
Menerapkan *single identity* (CIF)



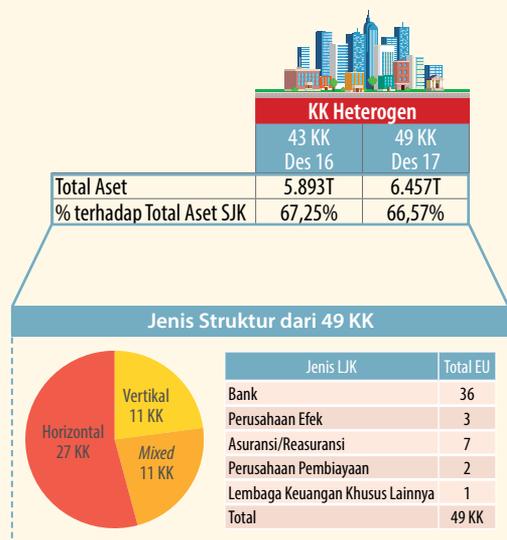
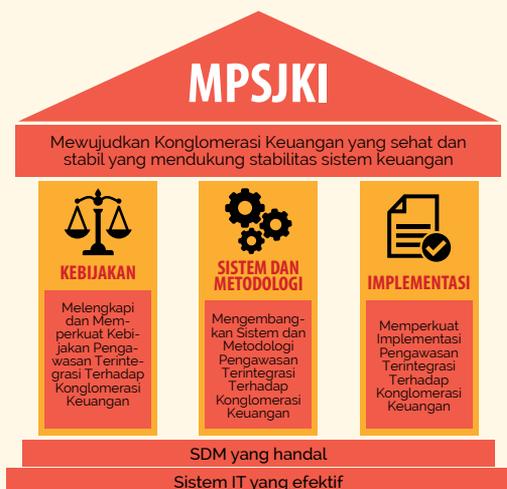


Pengembangan Infrastruktur

Roadmap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)



Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Terintegrasi



- **Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan** adalah pengawasan Konglomerasi Keuangan menggunakan metodologi pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi risiko secara dini dan mengambil tindakan secara tepat.
- Terdapat **49 Grup Konglomerasi Keuangan Lintas Sektor** yang terdiri dari 11 KK bersifat *mixed structure*, 11 KK bersifat *vertical structure* dan 27 KK bersifat *horizontal structure* dengan total aset per Desember 2017 sebesar Rp6.457 triliun (66,57% dari total aset Industri Jasa keuangan).
- Telah diterbitkan **Roadmap Pengawasan Terintegrasi** yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), sejalan dengan kebijakan umum pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015 - 2019*. *Roadmap Pengawasan Terintegrasi 2017-2019* mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:
 - a) Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap KK;
 - b) Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; dan
 - c) Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK.
- Melengkapi infrastruktur Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi dan *enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) Tahap 3 – Modul Data Keuangan dan FICOR (*Financial Conglomerate Ratios*).



PENGAWASAN *MARKET CONDUCT*

- Pengawasan *Market Conduct* bertujuan untuk mengawasi pola perilaku dan interaksi antara PUJK dan konsumen agar mengurangi potensi kerugian masyarakat atas produk/layanan yang ditawarkan pelaku usaha jasa keuangan melalui penilaian mandiri (*Self Assesment*), pemantauan tematik (*Thematic Surveillance*), dan pemantauan iklan.

-
- *Self Assesment* menilai kebijakan, implementasi dan evaluasi atas lima prinsip perlindungan konsumen.

-
- Pemantauan tematik melalui pemantauan dan pemeriksaan tematik berdasarkan atas produk/layanan yang berpotensi merugikan konsumen.

-
- Pemantauan Iklan dilakukan melalui monitoring iklan media cetak nasional dan lokal agar sesuai dengan kriteria iklan yang baik yaitu akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan.

-
- Selama tahun 2017, OJK telah melaksanakan *Thematic Surveillance* perjanjian baku terhadap 9 Bank dan Pelaksanaan 2 Operasi Intelijen Pasar terhadap 3 Perusahaan Asuransi dan 1 Komunitas. Pengisian penilaian mandiri melibatkan 2.086 PUJK dan pemantauan iklan sebanyak 4 kali.



INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN NASIONAL



TARGET 2019: 35%

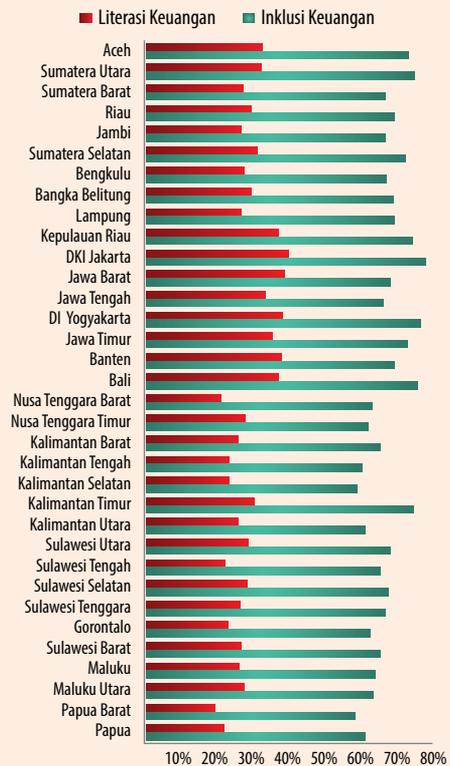
Amanat Perpres No. 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen



TARGET 2019: 75%

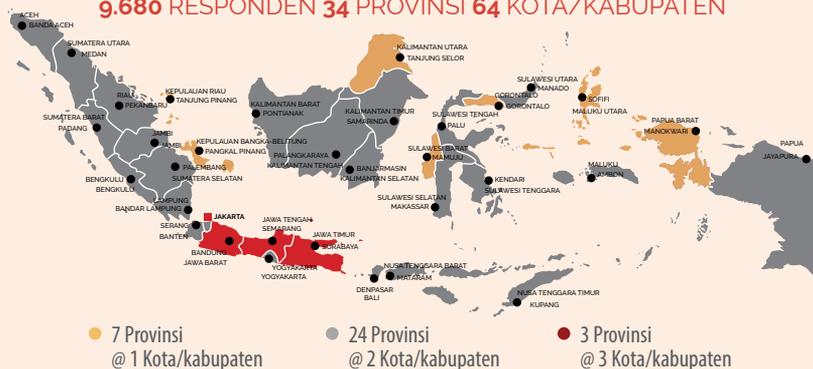
Amanat Perpres No. 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 2016 - PROVINSI



SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 2016

9.680 RESPONDEN 34 PROVINSI 64 KOTA/KABUPATEN



*Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

Dukungan Peningkatan Literasi Keuangan

Edukasi Keuangan 2017

- Jumlah peserta = +/- **17.249** orang
- Jumlah edukasi = **67** kegiatan
- Peningkatan pemahaman peserta: **13,95%**



SEGMENT PESERTA



Perempuan



UMKM



Pemuda,
Pelajar,
Mahasiswa



Professionals



Karyawan



Pensiunan

New targets



Remote
communities



Disabilitas



Petani &
Nelayan



Migrant
Workers

Edukasi Komunitas | Edukasi Masif | Edukasi Pelajar dan Mahasiswa

ToT Penyuluh | Edukasi Syariah

Edukasi Bantuan Sosial non Tunai



ToT Guru

Safari Ramadhan

Galeri Investasi Mobile

ToT Dosen

Outreach Program



BENTUK KEGIATAN



MATERI AJAR

- **Pengelolaan Keuangan**
- **Waspada Berinvestasi**
- **Pengenalan Produk/Layanan Jasa Keuangan, antara lain:**
 - Fitur produk
 - Manfaat dan risiko
 - Hak dan kewajiban
 - Cara mengakses/memperoleh produk
 - Biaya-biaya yang timbul atas perolehan produk
 - Cara untuk melakukan pencairan produk, penebusan, klaim, atau pelunasan produk
 - Informasi mekanisme transaksi
 - Perpajakan terkait produk/jasa keuangan.



Tingkat SMP



Tingkat SD



Buku “Mengenal OJK dan IJK kelas X” (tingkat SMA) versi Elektronik

Pengembangan program literasi keuangan ke berbagai kalangan dengan memperbarui materi buku literasi keuangan tingkat SMA melalui versi elektronik (*e-book*) dengan tujuan untuk mempermudah akses dan pendistribusiannya. Dilengkapi dengan video dan animasi pendukung sehingga menarik para siswa untuk membaca.

Buku “Mengenal Jasa Keuangan” untuk kelas IV dan V dan “Mengenal OJK dan IJK” tingkat SMP versi *e-learning*

Selain pengembangan *e-book* buku SMA, buku SD dan SMP juga dikembangkan dalam bentuk *e-learning*. Model *e-learning* dilengkapi dengan video, animasi pendukung serta games dengan harapan lebih mudah dipahami dan menarik serta atraktif (dalam tahap finalisasi)

Sosialisasi PISA

Sosialisasi Survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) di Medan dan Surabaya yang diikuti 208 kepala sekolah dan perwakilan guru dari 104 sekolah dari seluruh Indonesia. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mempersiapkan survei PISA tahun 2018 yang memiliki tambahan parameter pengukuran yaitu literasi keuangan. PISA merupakan studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) setiap 3 tahun. Untuk pertama kalinya Indonesia akan mengikuti tes PISA literasi keuangan pada tahun 2018.

Dukungan Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan



EDUKASI BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

Capaian tahun 2017

Dilaksanakan di 3 daerah yang memiliki jumlah penerima bantuan sosial terbanyak:

- Makassar
- Bekasi
- Surabaya



TARGET PESERTA

Keluarga Penerima Manfaat

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Agen Laku Pandai penyalur bantuan sosial non tunai

Pendamping Program Keluarga Harapan



KOMITMEN TAHUN 2018

- OJK **berkolaborasi** dengan Kementerian/ Lembaga terkait dalam mendukung edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat
- OJK bersama Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Sosial RI mempersiapkan **materi standar edukasi** dalam rangka bantuan sosial non tunai

Operasionalisasi SiMolek Mobil Pintar Literasi Keuangan



Operasionalisasi SiMOLEK bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi produk dan jasa keuangan masyarakat Indonesia khususnya pada wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik. Saat ini, wilayah operasionalisasi SiMOLEK berada di seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) di Indonesia yaitu di 35 kota dengan jumlah armada 41 mobil.

Operasionalisasi armada SiMOLEK merupakan salah satu upaya menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan. Sepanjang tahun 2017, jumlah pengunjung SiMOLEK sebanyak 130.763 orang dengan jumlah lokasi yang dikunjungi sebanyak 2.286 lokasi. SiMOLEK tersebut telah dilengkapi tambahan materi berupa majalah edukasi, brosur industri jasa keuangan, pengelolaan keuangan dan seri literasi keuangan, video literasi dan edukasi keuangan serta iklan layanan masyarakat (ILM).

	2015	2016	2017
Total Pengunjung	37.608	252.209	130.763
Total Lokasi	779	3.695	2.286





Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Kegiatan OJK Mengajar

No.	Bidang	Sekolah/Universitas
1.	Wimboh Santoso	Universitas Indonesia
		Universitas Sumatera Utara
		Universitas Andalas
2.	Nurhaida	SMA 70, Jakarta Selatan
		Institut Pertanian Bogor
3.	Heru Kristiyana	SMK 38, Jakarta Pusat
4.	Hoesen	SMA 8, Jakarta Selatan
5.	Riswinandi	SMA Pangudi Luhur, Jakarta Selatan
		UNAIR, Surabaya
6.	Ahmad Hidayat	SMA 61, Jakarta Timur
		SMP 26, Kebon Pala, Jakarta Pusat
7.	Tirta Segara	SMA 3, Yogyakarta
8.	Mardiasmo	SMA 3, Yogyakarta

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun OJK ke-6, seluruh Anggota Dewan Komisioner melaksanakan kegiatan OJK Mengajar di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan dilakukannya kegiatan ini antara lain adalah untuk menginspirasi insan OJK supaya senantiasa aktif berperan sebagai duta-duta literasi sektor jasa keuangan.



Penghargaan *Global Inclusion Awards 2017* dan *The Best Technology Innovation*



Indonesia mendapatkan apresiasi dunia internasional berupa **Global Inclusion Award 2017** sebagai pemenang pertama untuk kategori *Country Award* di regional Asia dan Pasifik, yang diselenggarakan oleh *Child and Youth Financial Internasional (CYFI)*.

Penghargaan tersebut diberikan bagi otoritas atau pemerintah yang dianggap berhasil dalam membangun kerja sama nasional antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim regulasi yang memperhatikan aspek keuangan bagi anak dan pemuda/i, serta memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan keuangan yang berkualitas melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.



OJK meraih penghargaan Gold untuk kategori *The Best Technology Innovation* bagi *Corporate*, pada ajang *The Best Contact Center Indonesia 2017*

Penilaian *The Best Technology Innovation* dilihat berdasarkan kemampuan *contact center* untuk menunjukkan inovasi

teknologinya pada kurun waktu tertentu, serta dampaknya pada bisnis dan operasional *contact center*.

OJK berhasil meraih penghargaan tersebut, karena merupakan lembaga negara pertama yang menerapkan fitur utama *trackable* dan *traceable* dalam menangani pengaduan konsumen. Melalui fitur tersebut, konsumen dapat memantau perkembangan pengaduannya secara *real-time*, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait dapat memantau serta meng-*update* progress penanganan pengaduan yang disampaikan konsumen kepada OJK secara *online* di alamat <http://konsumen.ojk.go.id>. Sehingga konsumen dan LJK sama-sama mendapatkan keuntungan, begitu pula dengan OJK yang dapat memperoleh *feedback* secara langsung. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan pengaduan konsumen dan masyarakat dapat dikelola secara cepat tanggap oleh OJK.





Penguatan Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Asuransi Mikro



Jumlah LKM
Terdaftar 176 LKM
dengan total Aset
Rp 404.67 miliar



Jumlah Peserta
Tertanggung Asuransi
Mikro 19.840.951
peserta dengan
jumlah premi sebesar
Rp 1.009,34 miliar.



Keuangan Syariah Fair (KSF)

Program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS).

Selama 2017, kegiatan ini dilakukan di 3 kota dan telah berhasil menambah **15.369 rekening** perbankan syariah dengan total nominal **Rp178,4 Miliar** dan **533 Number of Account** (NoA) dari IKNB Syariah.

Expo iB Vaganza

Kegiatan rutin dalam rangka peningkatan *outreach* nasabah baru perbankan syariah.

Selama 2017, Telah dilaksanakan IB Vaganza ke 5 Kota dan berhasil melakukan pembukaan rekening sejumlah **26.477 rekening** dengan total **outstanding Rp1.506 miliar**.

ROADMAP SJK SYARIAH

OJK meluncurkan rencana strategis pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui *Roadmap* Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah. *Roadmap* diharapkan menjadi acuan bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri keuangan syariah





Model Bisnis Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

- Salah satu tugas OJK adalah meningkatkan **akses keuangan** bagi **masyarakat luas**, dalam rangka **mendukung program pemerintah** untuk mengatasi masalah **kemiskinan** dan **ketimpangan pendapatan**.

- Pada Semester II 2017, OJK berinisiatif untuk mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan, yaitu dengan pendirian **LKM Syariah di lingkungan Pesantren**.



Target pasar:

- Masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja;
- Masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik.



Karakteristik LKM Syariah:

- Menyediakan Pembiayaan & Pendampingan
- Non Deposit Taking
- Imbal Hasil Rendah, setara 3%
- Berbasis Kelompok
- Tanpa Agunan

Fitur dan Karakteristik Pembiayaan dan Daftar Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)



Pembiayaan berbasis syariah tanpa jaminan.



Calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.



Produk pembiayaan sebesar Rp1-3 juta



Margin pembiayaan setara 3% per tahun.



Menggunakan sistem tanggung renteng.



Nasabah berada dalam radius 5 km dari Pesantren agar dapat terjangkau oleh kendaraan (sepeda) dan mudah terkontrol.



Pada akhir 2017 terdapat Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)



Peresmian Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)



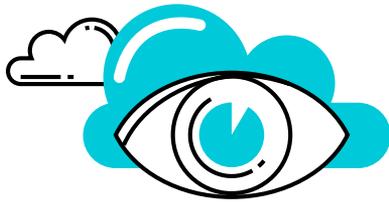
Pada Jumat 20 Oktober 2017, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meresmikan Bank Wakaf Mikro LKM Syariah di Pesantren KHAS Kempek, Cirebon.



OJK mendukung gagasan Presiden untuk memperluas inklusi keuangan melalui perluasan akses keuangan kepada masyarakat produktif sekitar pesantren.

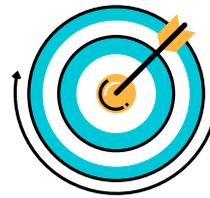


Arah Pengembangan Financial Technology (FinTech)



VISI

Menjadi lembaga yang kredibel untuk memastikan inovasi keuangan digital yang aman, handal, dan bermanfaat bagi industri keuangan Indonesia



MISI

1. Mengarahkan inovasi keuangan digital agar bermanfaat bagi konsumen jasa keuangan Indonesia dan mendorong stabilitas sistem keuangan.
2. Mendorong inovasi layanan keuangan digital yang inklusif dan memenuhi prinsip kehati-hatian
3. Memberikan kontribusi positif terhadap pengawasan dan pengaturan inovasi keuangan digital

Roadmap Financial Technology

Enhancement (2021-2023)

- Menghasilkan standarisasi teknologi keuangan digital
- Menghasilkan peraturan model bisnis baru
- Memastikan kesamaan perlakuan semua pelaku inovasi keuangan *digital*



Transitioning (2019-2020)

- Eksekusi *enhanced sandbox*
- Eksekusi *enhanced innovation hub*
- Memberikan Masukan penyesuaian Peraturan eksisting



Emerging (2017-2018)

- *Capacity Building*
- Konsepsi *Sandbox*
- Konsepsi *Innovation Hub*
- Eksekusi *Sandbox*
- Eksekusi *Innovation Hub*
- Memberikan Masukan kepada pengawas LJK terkait *fintech*

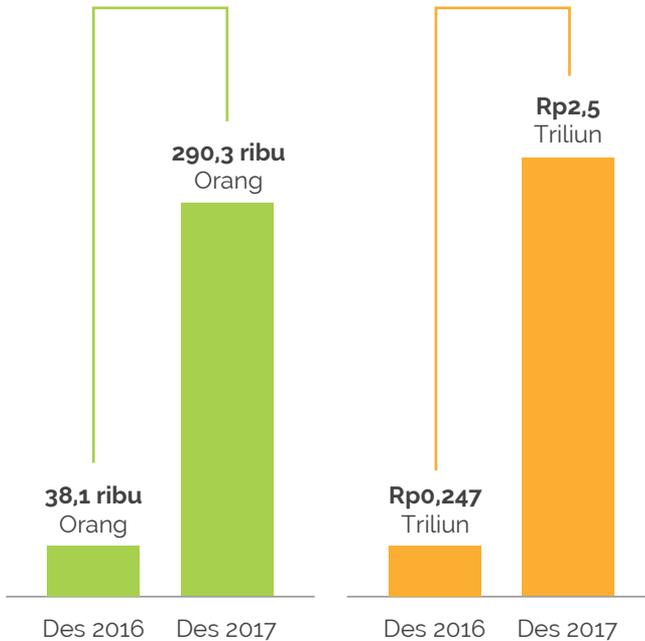




Perkembangan Industri Fintech Peer To Peer Lending (P2P) di Indonesia

Jumlah peminjam naik
661,84% dibandingkan akhir
tahun 2016

Jumlah nilai pembiayaan
naik 814,98% dibandingkan
akhir tahun 2016



Peer to Peer Lending

- **28** perusahaan P2P Lending telah terdaftar/berizin





Layanan Pengaduan Konsumen

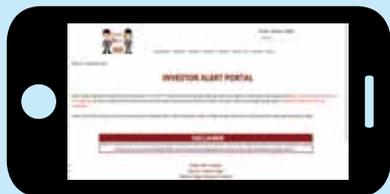
- OJK memiliki Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable* dan layanan tersebut tersedia di 35 KR/KOJK yang sudah memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015.
- Revitalisasi Layanan Konsumen OJK 1500655 menjadi Kontak OJK 157
- Penguatan infrastruktur dan layanan, biaya pulsa lokal
- Laporan penanganan pengaduan internal PUJK kepada OJK melalui SIPEDULI

Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan

Strategi ini ditujukan untuk menciptakan budaya *treat customer fairly* yang mengedepankan prinsip keseimbangan yaitu kepercayaan terhadap produk jasa keuangan



yang ditawarkan (*market confidence*) dan terwujudnya level *playing field* antara konsumen dan lembaga jasa keuangan.



Investor Alert Portal (IAP) untuk merespon pertanyaan masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu. **Sampai dengan Desember 2017, terdapat 129 entitas yang masuk dalam daftar Investor Alert Portal.**

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang merupakan lembaga yang membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa Produk Jasa Keuangan. Terdiri atas 6 LAPS yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Dukungan OJK terhadap LAPS:

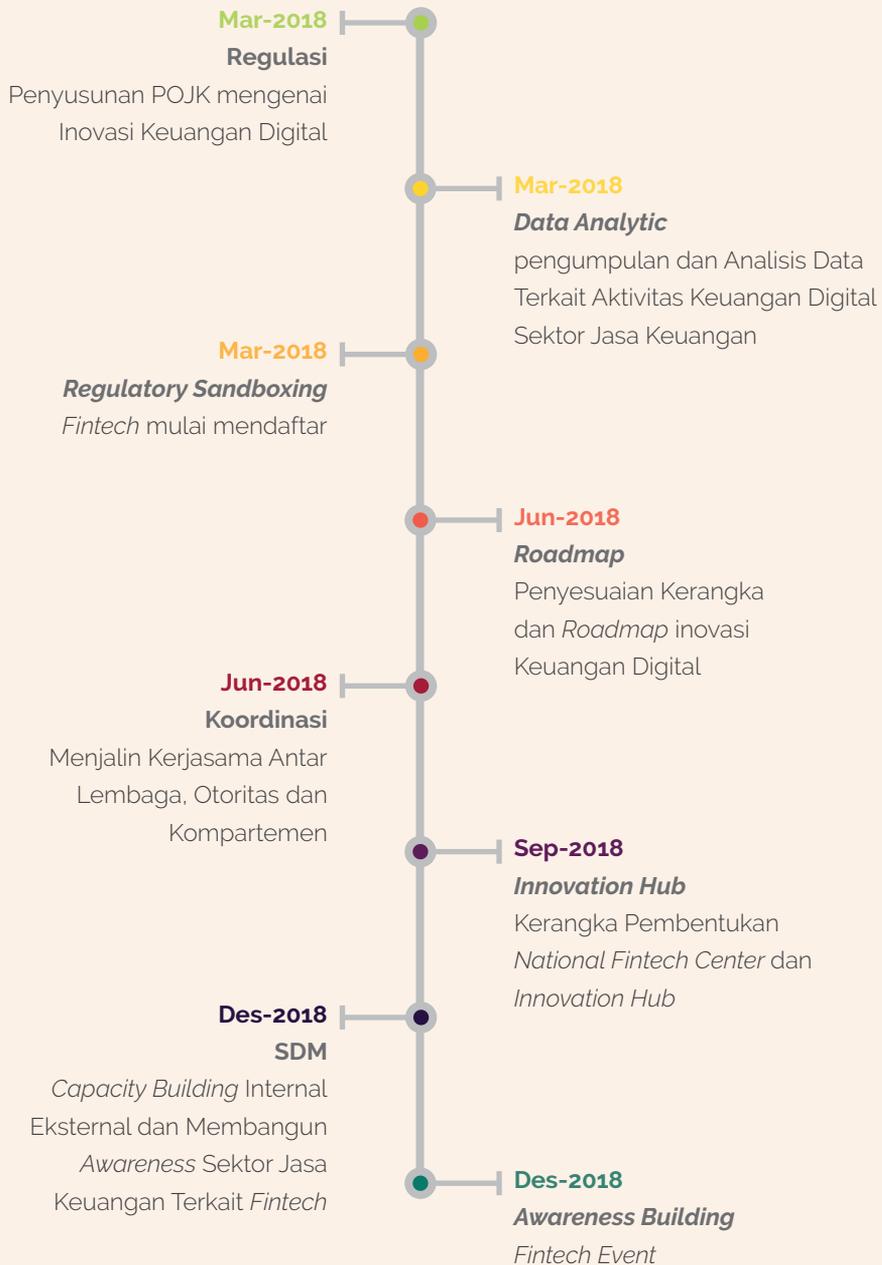
- a. Sertifikasi Mediator
- b. Peminjaman ruang kantor OJK untuk mediasi
- c. Bantuan dana operasional
- d. Sosialisasi LAPS kepada pihak terkait



Pengembangan Fintech 2017



Inisiatif Keuangan Digital Roadmap 2018



Meningkatkan Efektifitas Perlindungan Konsumen



Selama tahun 2017 OJK menerbitkan **17** Surat Perintah Penyidikan (**Sprindik**) yang terdiri dari 12 perkara Perbankan, 4 perkara Pasar Modal dan 1 perkara IKNB. Dari perkara yang sudah dilakukan penyidikan, terdapat 5 perkara yang diserahkan kepada Jaksa Peneliti dan yang sudah dinyatakan lengkap (**P-21**) sebanyak **4** berkas perkara perbankan. Selanjutnya dari 4 perkara perbankan yang telah P-21 tersebut, **2** perkara telah mendapatkan putusan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan putusan pengadilan.



Satgas Waspada Investasi
Bertujuan meningkatkan kesadaran dan perlindungan kepada masyarakat serta mengurangi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penawaran investasi ilegal. Telah dibentuk Tim kerja **Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID)** di **40 Daerah**. Sampai **Desember 2017** Satgas Waspada Investasi telah melakukan penghentian kegiatan operasional terhadap **80 Entitas** yang terindikasi penyimpangan izin yang diberikan instansi terkait. Terdapat **12 Entitas** yang telah diproses hukum, dan **2 Entitas** telah mendapatkan putusan hukum sesuai dengan vonis pengadilan.

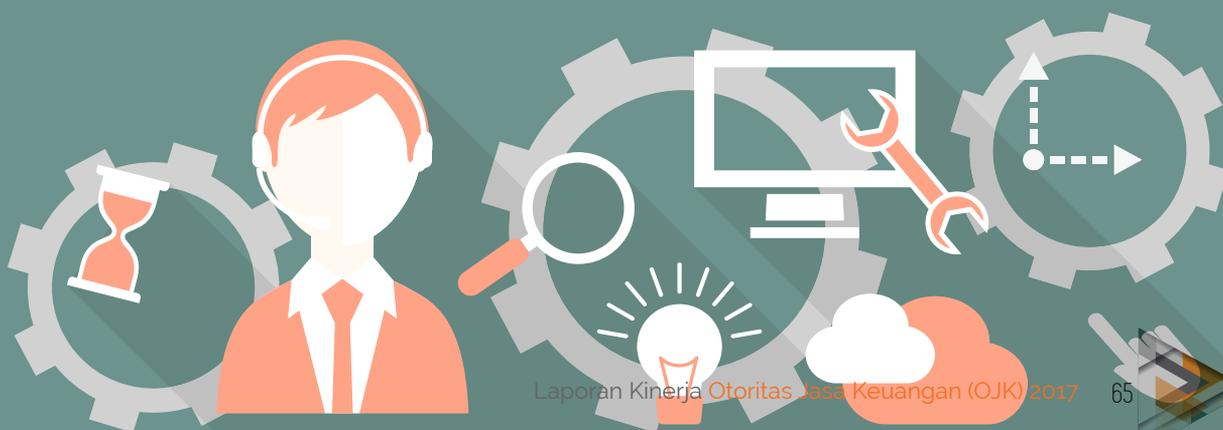
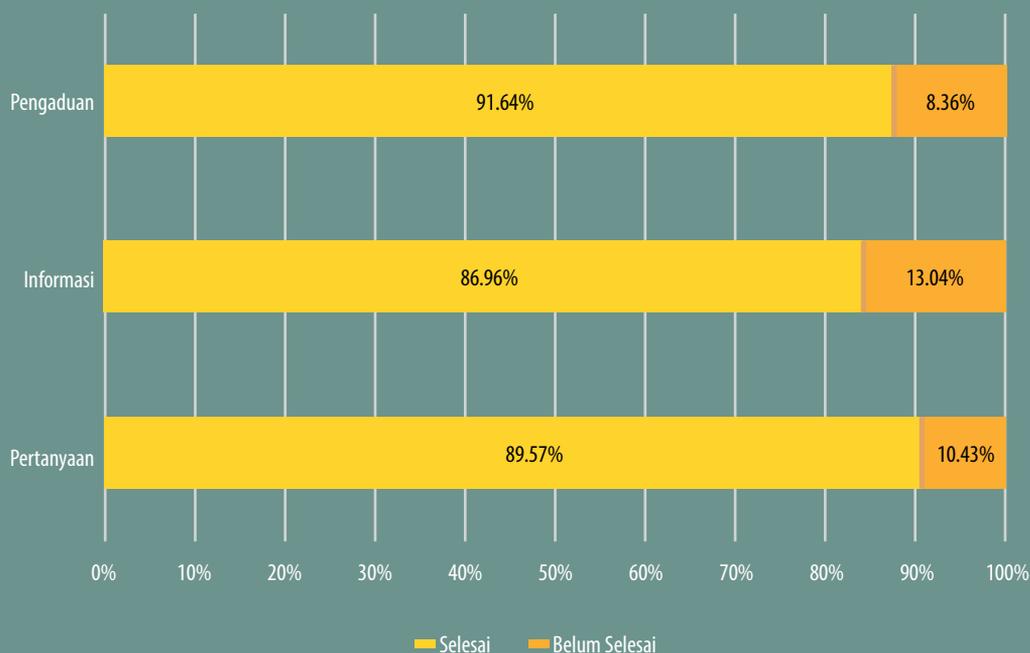
Meningkatkan Efektifitas Perlindungan Konsumen



Selama tahun 2017, OJK menerima layanan kepada masyarakat antara lain **19.752** permintaan informasi (**Pertanyaan**), **5.690** penyampaian informasi dan **163** pengaduan dengan tingkat penyelesaian masing-masing sebesar 91,64% , 86,96% dan 89,57%.

Persentase Penyelesaian Layanan FCC

(Per 31 Desember 2017)



Re-Branding Contact Center OJK



Amanat Perpres No. 50/2017 tentang Strategi Nasional
Perlindungan Konsumen

Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen Keuangan



- 1 Revitalitasi *contact center* OJK dari 1500 655 menjadi **KONTAK OJK 157**
- 2 Integrasi dengan layanan SLIK dan SIPO
- 3 Penambahan kapasitas infrastruktur layanan





Pelaksanaan
Tugas Pokok
OJK



Halaman ini sengaja dikosongkan

Selama tahun 2017, OJK menerbitkan 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur Sektor Jasa Keuangan di Indonesia di mana 23 POJK di bidang Perbankan, 48 POJK di bidang Pasar Modal, 7 POJK di bidang IKNB dan 1 POJK mengenai Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Berikut detail peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat dijabarkan sebagai berikut

NO	Nomor POJK	Perihal
1	POJK No.13/POJK.03/2017	Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
2	POJK No.14/POJK.03/2017	Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik
3	POJK No.15/POJK.03/2017	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
4	POJK No.16/POJK.03/2017	Bank Perantara
5	POJK No.18/POJK.03/2017	Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
6	POJK No.19/POJK.03/2017	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7	POJK No.36/POJK.03/2017	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal
8	POJK No.37/POJK.03/2017	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
9	POJK No.38/POJK.03/2017	Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
10	POJK No.39/POJK.03/2017	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
11	POJK No.40/POJK.03/2017	Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham
12	POJK No.41/POJK.03/2017	Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank



13	POJK No.42/POJK.03/2017	Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
14	POJK No.43/POJK.03/2017	Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank
15	POJK No.44/POJK.03/2017	Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/ atau Pengolahan Tanah
16	POJK No.45/POJK.03/2017	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
17	POJK No.46/POJK.03/2017	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
18	POJK No.47/POJK.03/2017	Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
19	POJK No.48/POJK.03/2017	Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
20	POJK No.49/POJK.03/2017	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
21	POJK No.50/POJK.03/2017	Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum
22	POJK No.51/POJK.03/2017	Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
23	POJK No.59/POJK.03/2017	Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Renumerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

NO	Nomor POJK	Perihal
1	POJK No.4/POJK.04/2017	Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
2	POJK No.6/POJK.04/2017	Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
3	POJK No.7/POJK.04/2017	Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
4	POJK No.8/POJK.04/2017	Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
5	POJK No.9/POJK.04/2017	Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
6	POJK No.10/POJK.04/2017	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
7	POJK No.11/POJK.04/2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
8	POJK No.20/POJK.04/2017	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan
9	POJK No.21/POJK.04/2017	Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual
10	POJK No.22/POJK.04/2017	Pelaporan Transaksi Efek
11	POJK No.23/POJK.04/2017	Prospektus Awal dan Info Memo
12	POJK No.24/POJK.04/2017	Laporan Bank Umum sebagai Kustodian



13	POJK No.25/POJK.04/2017	Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
14	POJK No.26/POJK.04/2017	Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit
15	POJK No.27/POJK.04/2017	Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
16	POJK No.28/POJK.04/2017	Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat
17	POJK No.29/POJK.04/2017	Laporan Wali Amanat
18	POJK No.30/POJK.04/2017	Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
19	POJK No.31/POJK.04/2017	Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda
20	POJK No.32/POJK.04/2017	Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
21	POJK No.33/POJK.04/2017	Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
22	POJK No.34/POJK.04/2017	Reksa Dana Target Waktu
23	POJK No.35/POJK.04/2017	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
24	POJK No.52/POJK.04/2017	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
25	POJK No.53/POJK.04/2017	Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah
26	POJK No.54/POJK.04/2017	Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah

27	POJK No.57/POJK.04/2017	Penetapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
28	POJK No.58/POJK.04/2017	Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik
29	POJK No.60/POJK.04/2017	Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>)
30	POJK No.61/POJK.04/2017	Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
31	POJK No.62/POJK.04/2017	Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
32	POJK No.63/POJK.04/2017	Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
33	POJK No.64/POJK.04/2017	Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
34	POJK No.65/POJK.04/2017	Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
35	POJK No.66/POJK.04/2017	Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
36	POJK No.67/POJK.04/2017	Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
37	POJK No.68/POJK.04/2017	Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
38	POJK No.69/POJK.04/2017	Pemeliharaan Dokumen oleh Bursa Efek
39	POJK No.70/POJK.04/2017	Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
40	POJK No.71/POJK.04/2017	Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
41	POJK No.72/POJK.04/2017	Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan Efek





Pengaturan Sektor Pasar Modal

42	POJK No.73/POJK.04/2017	Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi
43	POJK No.74/POJK.04/2017	Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
44	POJK No.75/POJK.04/2017	Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
45	POJK No.76/POJK.04/2017	Penawaran Umum oleh Pemegang Saham
46	POJK No.77/POJK.04/2017	Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
47	POJK No.78/POJK.04/2017	Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam
48	POJK No.79/POJK.04/2017	Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal

Pengaturan Sektor IKNB

NO	Nomor POJK	Perihal
1	POJK No.1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
2	POJK No.2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
3	POJK No.3/POJK.05/2017	Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin
4	POJK No.5/POJK.05/2017	Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun
5	POJK No.17/POJK.05/2017	Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
6	POJK No.55/POJK.05/2017	Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian
7	POJK No.56/POJK.05/2017	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Pengaturan Mengenai Penyidikan

NO	Nomor POJK	Perihal
1	POJK No.12/POJK.01/2017	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan





Undang-Undang

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) telah ditetapkan pada April 2016. UU ini disusun sebagai landasan hukum bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia agar berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

Ruang lingkup:



Pencegahan (pemantauan dan pemeliharaan SSK)



Penanganan krisis sistem keuangan



Penanganan masalah bank sistemik

Prinsip utama:



Memperkuat koordinasi empat lembaga



Metode penanganan lebih lengkap



Penguatan pengawasan Perbankan



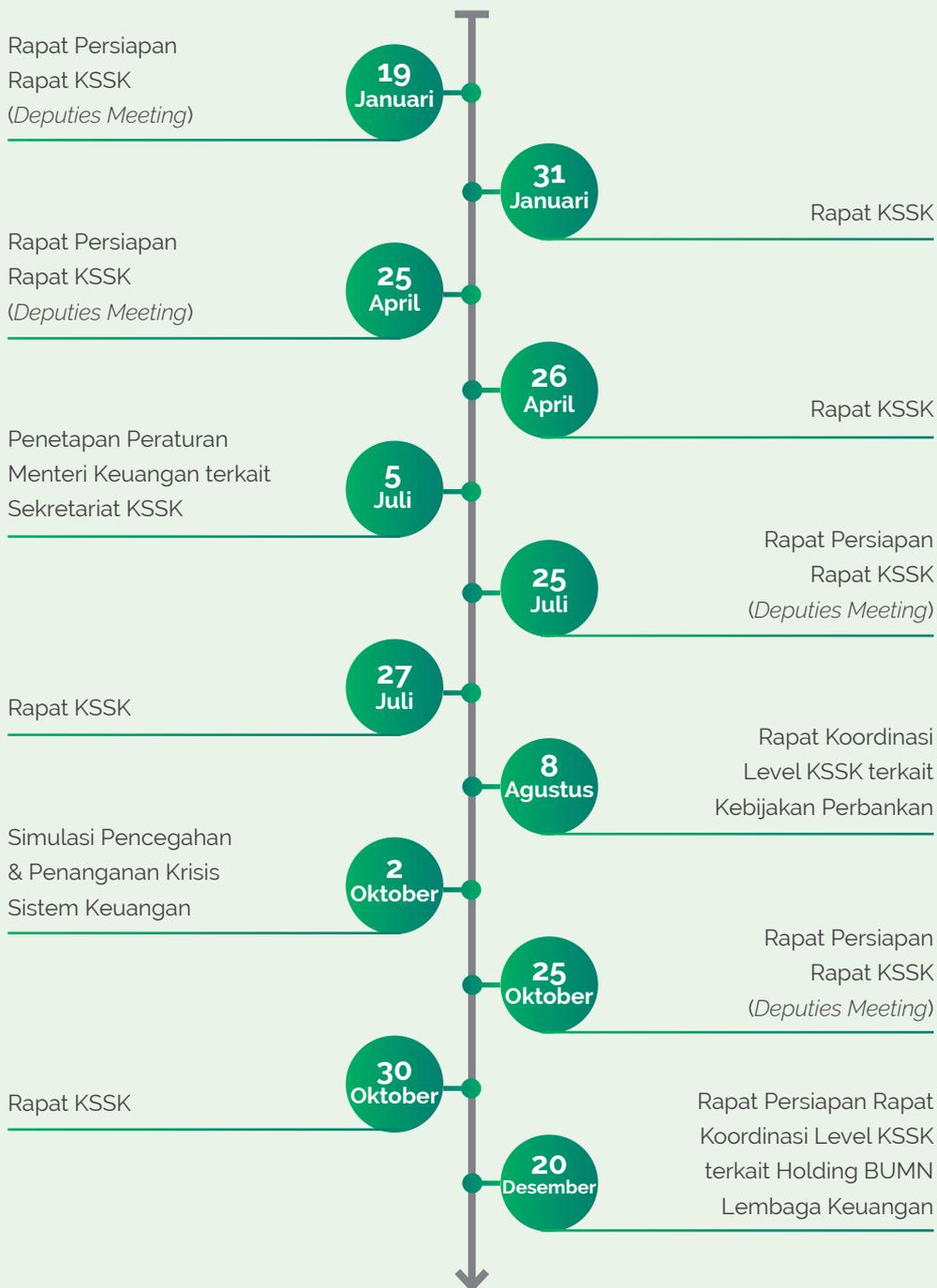
Kendali Presiden



Bail-in



Agenda Komite Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2017



Penguatan Protokol Manajemen Krisis

Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memberikan perhatian pada penyempurnaan ketentuan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis serta penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

.....



Tindak Lanjut Pasca-Penetapan UU PPKSK

- Sebagai implementasi ketentuan UU PPKSK, pada tahun 2017 OJK menerbitkan 3 peraturan terkait (i) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik; (ii) Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum; dan (iii) Bank Perantara.
- OJK menetapkan daftar bank sistemik setiap enam bulan sekali, dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.



Simulasi Protokol Manajemen Krisis

- KSSK telah menyelenggarakan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis 2017 secara *full dress*. Simulasi ini dihadiri oleh seluruh anggota KSSK (Ketua Dewan Komisiner OJK, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisiner LPS).
- Tujuan simulasi adalah untuk menguji keterterapan ketentuan UU PPKSK serta penanganan solvabilitas Bank Sistemik sebelum terjadinya krisis sistem keuangan.



Penguatan Protokol Manajemen Krisis Internal OJK

- Pada tahun 2017 OJK menyempurnakan ketentuan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis agar selaras dengan UU PPKSK.
- Kegiatan pemantauan (*surveillance*) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan di sektor jasa keuangan. Indikator-indikator pemantauan sektor jasa keuangan juga terus disempurnakan secara berkesinambungan.



- Pada tahun 2017, Indonesia telah menyelesaikan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). FSAP merupakan *joint program* antara *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB) yang bertujuan mengevaluasi kondisi stabilitas sistem keuangan dan perkembangan sektor keuangan suatu negara. Indonesia sebagai anggota G-20 berkomitmen untuk melaksanakan FSAP lima tahun sekali dan tahun 2016/2017 merupakan pelaksanaan FSAP yang kedua bagi Indonesia setelah tahun 2009/2010. Agar pelaksanaan FSAP berjalan efektif dan efisien, telah dibentuk Tim Kerja Nasional FSAP yang beranggotakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan OJK sebagai koordinator.
- Tim FSAP datang ke Indonesia melalui dua misi yaitu tanggal 19 September - 4 Oktober 2016 (*Mission I*) dan tanggal 30 Januari - 16 Februari 2017 (*Main Mission*). Selain berdiskusi dengan anggota Tim Kerja Nasional FSAP, Tim FSAP juga bertemu dengan Industri Jasa Keuangan (IJK), Asosiasi IJK, Lembaga Jasa Penunjang, dan lembaga terkait lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif atas kondisi stabilitas sistem keuangan dan perkembangan sektor keuangan Indonesia.
- Sesuai kesepakatan, FSAP difokuskan pada tujuh *workstreams* (WS)/gugus tugas, yaitu *WS1-Risk Analysis & Stress Testing*, *WS2-Macroprudential Policy*, *WS3-Liquidity Management*, *WS4-Microprudential Oversight*, *WS5-Financial Safety Nets*, *Crisis Management and Resolution*, *WS6-Financial Deepening*, dan *WS7-Financial Inclusion*. Laporan hasil asesmen FSAP tersebut selanjutnya telah dipublikasikan dalam *website* IMF dalam bentuk *Financial System Stability Assessment* (FSSA) dan *website* WB dalam bentuk *Financial Sector Assessment* (FSA).
- Secara umum, Tim FSAP mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan reformasi di sektor jasa keuangan sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga dengan baik. Sistem perbankan tetap sehat dengan kapitalisasi bank yang tetap kuat. Risiko sistemik rendah dan sistem perbankan menunjukkan resiliensi terhadap gejolak. Pemerintah dan otoritas telah melaksanakan berbagai agenda dalam rangka percepatan pendalaman pasar keuangan serta penguatan pengawasan sektor jasa keuangan dan manajemen krisis. FSAP juga mencatat beberapa area yang masih dapat ditingkatkan pelaksanaannya antara lain terkait dengan penyempurnaan beberapa regulasi khususnya menyangkut mandat dan perlindungan hukum, pengawasan terutama terhadap konglomerasi keuangan, dan kerangka manajemen krisis dan resolusi agar lebih efektif.



Halaman ini sengaja dikosongkan



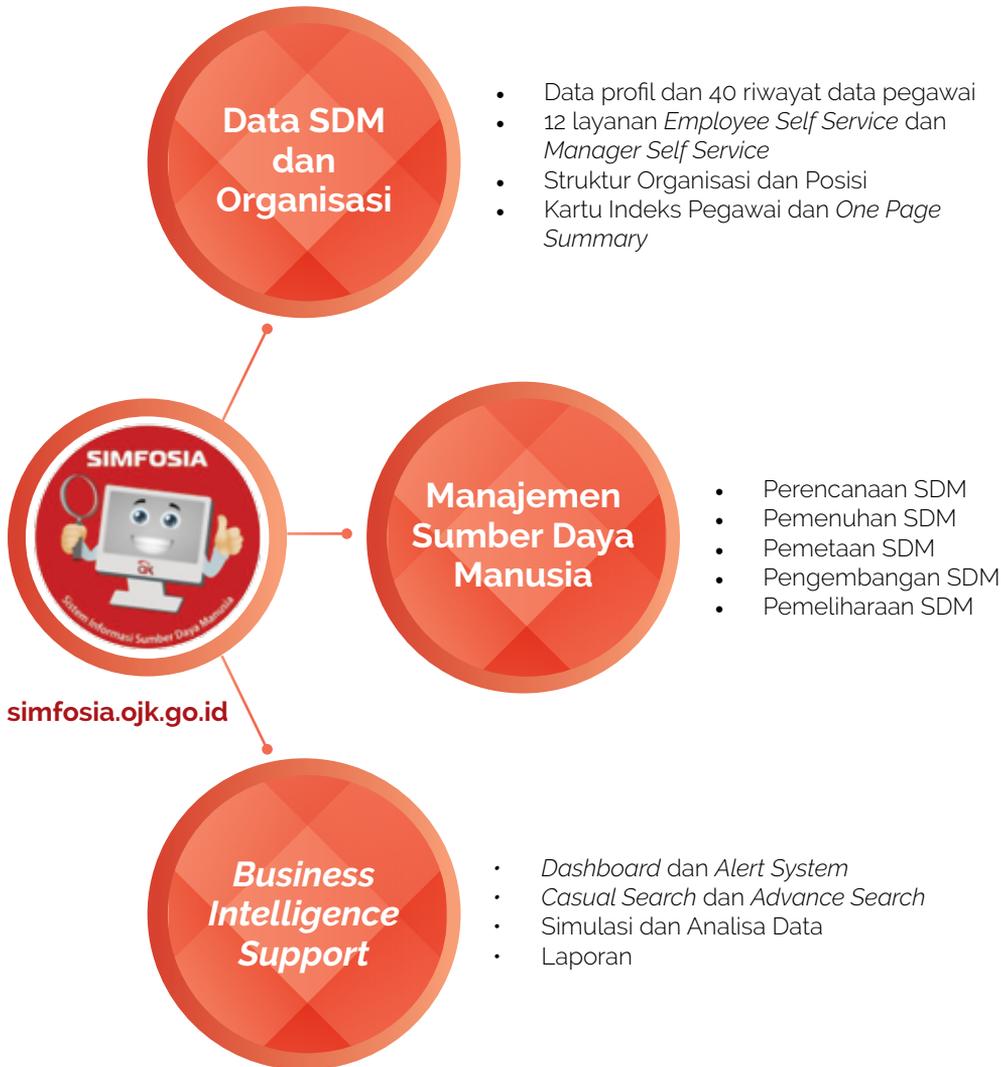
Program Strategis OJK
**Untuk Peningkatan
Kapasitas Organisasi**



Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia – OJK Institute

OJK Institute merupakan transformasi dari unit *learning center* di OJK yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi SDM OJK baik kompetensi teknis maupun kemampuan kepemimpinan yang profesional dan handal serta membangun masyarakat keuangan Indonesia yang lebih baik. Pembangunan *OJK University* dilakukan secara bertahap sesuai dengan *blueprint* 2015 - 2017. Beberapa fungsi *OJK University* antara lain :



- **Learning Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dan pengembangan potensi SDM OJK serta pengembangan pemahaman *stakeholder* OJK sebagai bagian *recycling* program OJK



- **Assessment Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan asesmen untuk SDM OJK melalui metode *assessment center*



- **Research Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan kajian dan penelitian sesuai kebutuhan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK

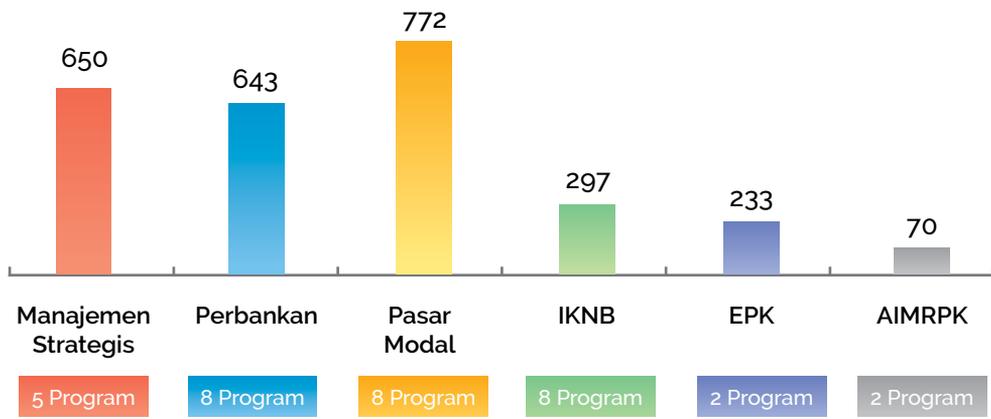


- **Financial Library**, merupakan fungsi yang memfasilitasi penyediaan referensi serta buku yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas, penyusunan kajian dan penelitian serta pengembangan pegawai



- **Museum**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pendokumentasian perjalanan OJK serta memberikan edukasi kepada pihak internal dan eksternal OJK

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (*Recycling Program*)



Beberapa Pilihan Topik *Recycling Program*

1. *Workshop* Penerapan Program APU PPT bagi Industri Jasa Keuangan khususnya Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
2. *Workshop* Aspek Pendanaan Dalam Perubahan Peraturan Dana Pensiun
3. *Workshop* Pendalaman Aspek Hukum pada Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
4. AIMRPK - *Pathway to Professional Accountant Training*
5. *Workshop* Pengawasan Terintegrasi
6. *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Syariah
7. *Workshop* Manajemen Risiko, Tata kelola dan IT bagi BPR/BPRS
8. *Workshop* Teknologi Informasi (TI), *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan Strategi Penanganan *Fraud* bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD)



Jaringan Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK)



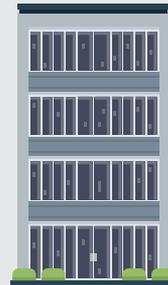
31 Kantor Regional / Kantor OJK telah menempati gedung sendiri.



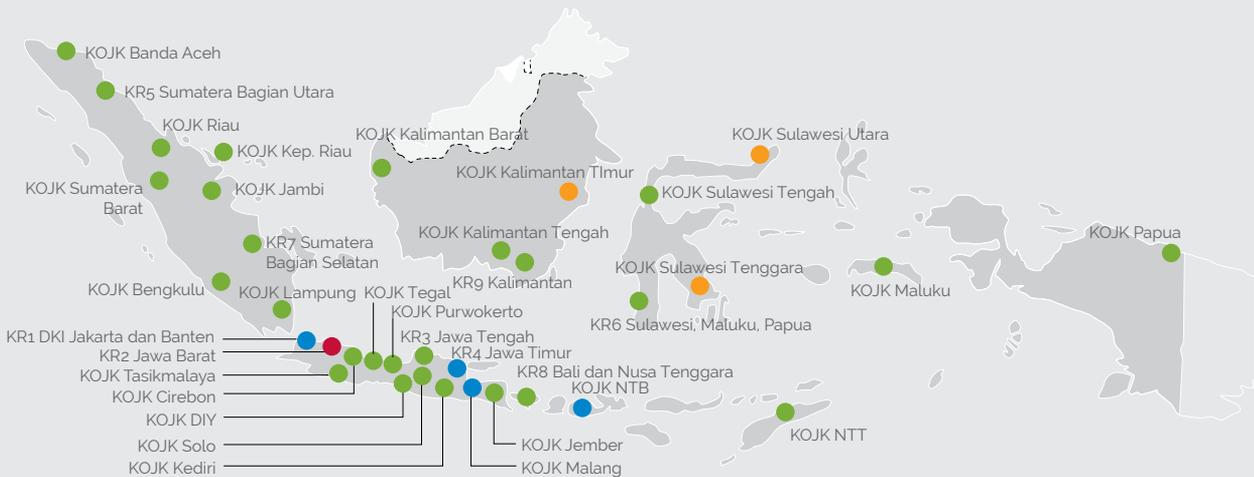
3 pinjam pakai aset Pemerintah Provinsi



1 Kantor Regional / Kantor OJK mandiri milik sendiri



27 Sewa

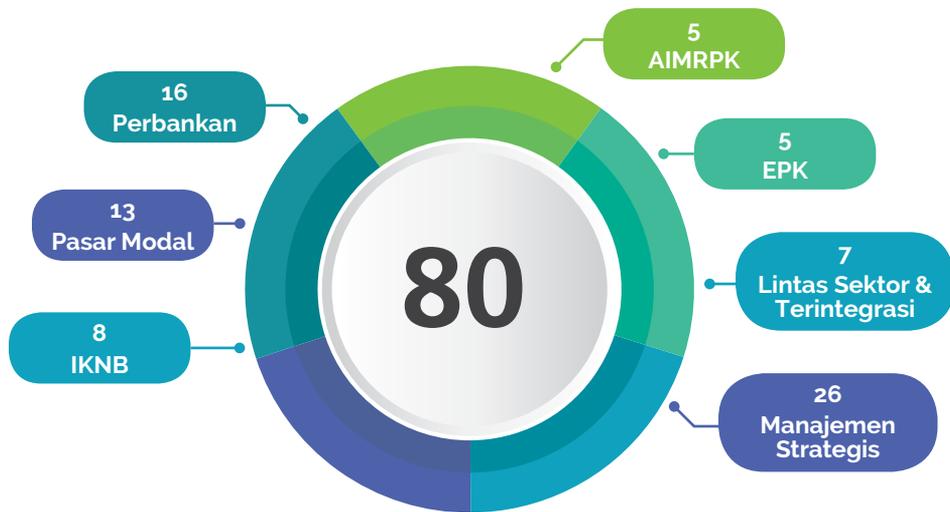


Keterangan:

- Mandiri/Milik OJK
- Sharing dengan gedung BI
- Pemprov
- Sewa

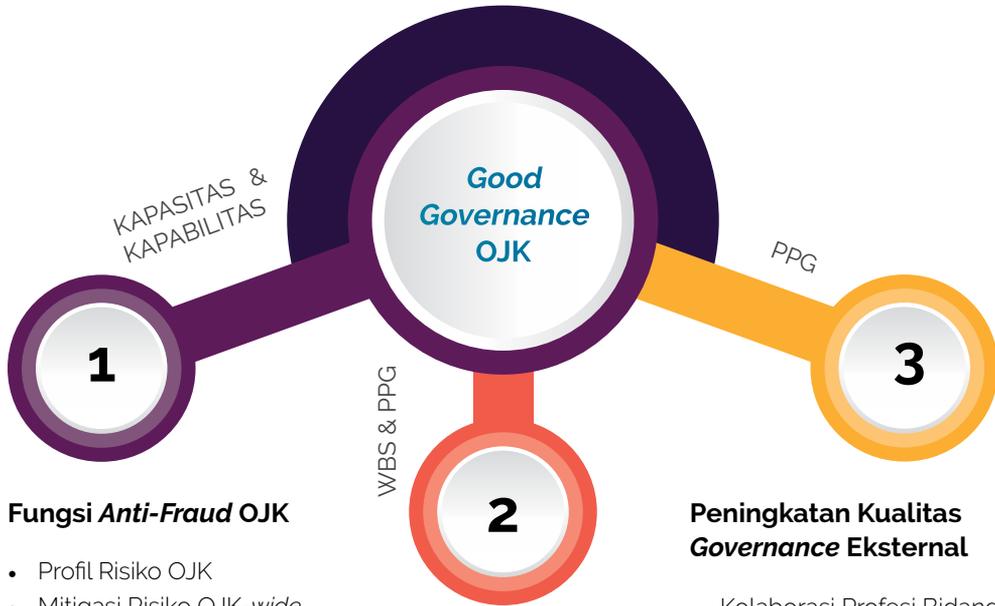


Jumlah Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Tugas



Untuk mendukung OJK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selama 2017 OJK telah mengembangkan infrastruktur pendukung baik aplikasi maupun pengembangan jaringan TI di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK. Aplikasi yang dikembangkan antara lain :

1. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
2. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
3. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) *Financial Conglomerates*
4. *Data Warehouse* Pasar Modal
5. *Data Warehouse* Bank Umum
6. *E-Procurement* OJK
7. Sistem Informasi Pelaporan Informasi Gratifikasi (SIPEGA)
8. Sistem Informasi Akutansi OJK (SI-AUTO)
9. Sistem Informasi Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (SI PELAKU)



Fungsi Anti-Fraud OJK

- Profil Risiko OJK
- Mitigasi Risiko OJK-wide terkait *Process, People* dan *Technology*
- Pelaksanaan *Control Self-Assessment*
- Pengendalian Kualitas

Optimalisasi *Whistle Blowing System*

- *Go Live Enhancement* WBS
- Peningkatan efektifitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya
- Optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh *stakeholder*.

Program Pengendalian Gratifikasi

- Pengelolaan Program Pengendalian Gratifikasi internal dan eksternal.
- *Go Live enhancement* Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi "SiPeGa"

Peningkatan Kualitas *Governance Eksternal*

- Kolaborasi Profesi Bidang GRC
- Forum *Governance*

**Penghargaan dari KPK untuk Unit Pengendalian
Gratifikasi OJK sebagai "Sistem Pengendalian
Gratifikasi Terbaik dan Pelaporan LHKPN Terbaik
2017" Kategori: Kementerian dan Lembaga**



*OJK memperoleh Penghargaan Implementasi E-LHKPN Terbaik dan Sistem
Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dari KPK*

Otoritas Jasa Keuangan meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 di kategori Kementerian dan Lembaga. Penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang kedua kalinya diterima OJK.



OJK Whistle Blowing System (WBS)

OJK memiliki komitmen tinggi untuk memupuk kepercayaan masyarakat melalui penguatan integritas seluruh praktisi/pelaku industri jasa keuangan, khususnya integritas insan OJK sendiri. Beberapa program penguatan integritas OJK di antaranya adalah membangun fungsi, strategi, dan sistem antifraud, pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, serta revitalisasi OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS).

OJK WBS adalah sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK. OJK WBS menggunakan 5 Prinsip:

1. *Commitment At Top Level*
2. *System Integrity*
3. *Blower Protection*
4. *Communication*
5. *Accesibility*



LAPORKAN
melalui
OJK WBS
OJK Whistle Blowing System

www.ojk.go.id/wbs
ojk.wbs@rsm.id
PO Box: ETIK OJK JKT 10000

PELAPOR



1

Menyampaikan secara elektronik maupun non elektronik

Konsultan Pengelola WBS OJK



2

- Verifikasi dan analisa laporan
- Meneruskan laporan kepada OJK (selain data pelapor)
- Sebagai *liaison officer* antara Pelapor dengan OJK

Pejabat OJK Pengelola WBS



3

Memastikan laporan didukung data dan bukti memadai
Meneruskan laporan ke Komite Etik

Komite Etik OJK



4

Melakukan investigasi dugaan pelanggaran, kemudian memberikan rekomendasi sanksi berdasarkan pada hasil investigasi.

Dewan Komisiner atau Pejabat OJK



5

Berwenang mengeluarkan penetapan sanksi atas pelanggaran



6

Pelaksanaan keputusan penetapan sanksi.



MoU Kelembagaan Domestik

1. MoU OJK bersama OMBUDSMAN	Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di sektor jasa keuangan.
2. MoU OJK bersama Forum Rektor Indonesia	Kerjasama dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan dan inklusi keuangan
3. MoU OJK bersama UNAIR	Kerjasama dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan dan inklusi keuangan
4. MoU OJK bersama Dirjen Pajak	Kerjasama dalam bidang pengaturan, pengawasan dan penegakkan hukum serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan
5. MoU OJK bersama Persyarikatan Muhammadiyah	Kerjasama pengembangan keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan
6. MoU OJK bersama Universitas Muhammadiyah Malang	Kerjasama pengembangan keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan
7. MoU OJK bersama LPS, BI dan Kementerian Keuangan	Nota kesepahaman Kementerian Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK dan LPS tentang kerjasama program pengembangan kompetensi pegawai
8. MoU OJK bersama STIE IBS	Pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan

9. MoU OJK bersama Universitas Ahmad Dahlan	Pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan
10. MoU OJK bersama Muhammadiyah Yogyakarta	Pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan
11. MoU OJK bersama Universitas Pertahanan	Kerjasama dalam bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan
12. MoU OJK bersama BI	Kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pengembangan integrasi pelaporan sektor jasa keuangan
13. MoU OJK bersama Universitas Udayana	Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi melalui pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan pengembangan Bali <i>Center for Sustainable Finance</i>
14. MoU OJK bersama Universitas Sumatera Utara	Pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan
15. MoU OJK bersama LPPi	Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor jasa keuangan



Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Letter of Intent (LoI)* dengan beberapa Pengawas Sektor Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional pada tahun 2017 antara lain:

Pengawas Sektor Jasa
Keuangan Asing

Lembaga
Internasional

1. *LoI* OJK dengan Banko Sentral Ng Pilipinas (BSP)

1. *MoU* antara OJK dan International Labor Organization terkait *Supporting Inclusive Economic Growth*

2. *LoI* dan *Corporate Agreement* antara OJK dan Monetary Authority of Singapore (MAS)

3. *Corporation Agreement* antara OJK dan ASIC terkait *Innovation in Financial Services*



OJK telah memiliki mekanisme manajemen strategi yang mengacu pada sistem *Balanced Scorecard*



Sistem *Balanced Scorecard* tersebut diaplikasikan di dalam OJK melalui Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (Sistem MSAK) yang mengatur Manajemen Strategi, Manajemen Anggaran dan Manajemen Kinerja



Untuk melaksanakan sistem MSAK dengan baik melalui pelaksanaan pengelolaan kinerja yang sesuai dengan *governance*, OJK telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang komprehensif yaitu SIMPEL OJK



Sistem pengelolaan kinerja telah dihubungkan dengan penilaian kinerja individual pegawai dan mempengaruhi remunerasi dan insentif pegawai



Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja yang selanjutnya disingkat Sistem MSAK adalah suatu sistem yang mengintegrasikan:

Manajemen Strategi, yang terdiri dari perumusan, operasionalisasi, pelaksanaan dan *monitoring*, serta evaluasi pelaksanaan strategi

Manajemen Anggaran, yaitu rencana keuangan yang disusun berdasarkan kegiatan dan rencana kerja sebagai penjabaran strategi, yang terdiri dari penyusunan pagu indikatif, penyusunan dan pangajuan RKA ke DPR, dan *monitoring* serta evaluasi RKA

Manajemen Kinerja, yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian strategi, pelaksanaan tugas pokok dan realisasi anggaran, yang terdiri dari penyusunan kontrak kerja, *monitoring* dan evaluasi/ penilaian kinerja organisasi dan individu pegawai.

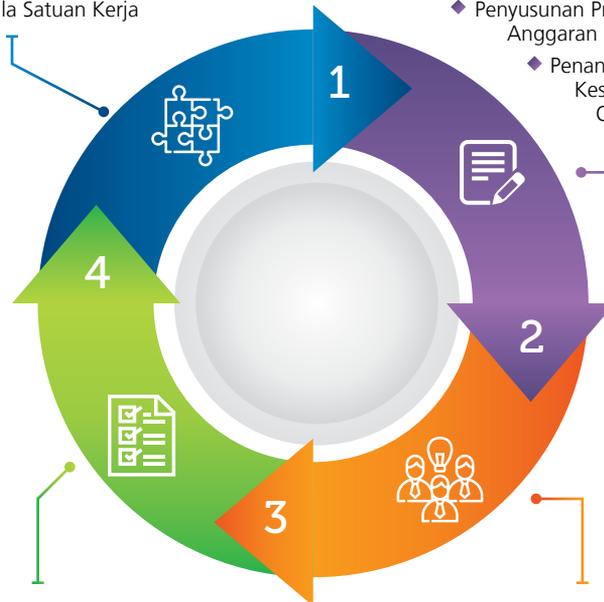
Siklus Sistem Manajemen Strategi, Anggaran Dan Kinerja (MSAK)

Penyusunan Strategi OJK

- ◆ Penyusunan & Penyesuaian Strategi OJK oleh ADK
- ◆ Komunikasi Arah Strategi OJK kepada Deputi Komisioner dan Kepala Satuan Kerja

Cascading & Alignment

- ◆ Penjabaran dan Penyelarasan Strategi OJK ke *Strategy Map* Deputi Komisioner dan Satuan Kerja
- ◆ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
 - ◆ Penandatanganan Kesepakatan Kinerja Organisasi

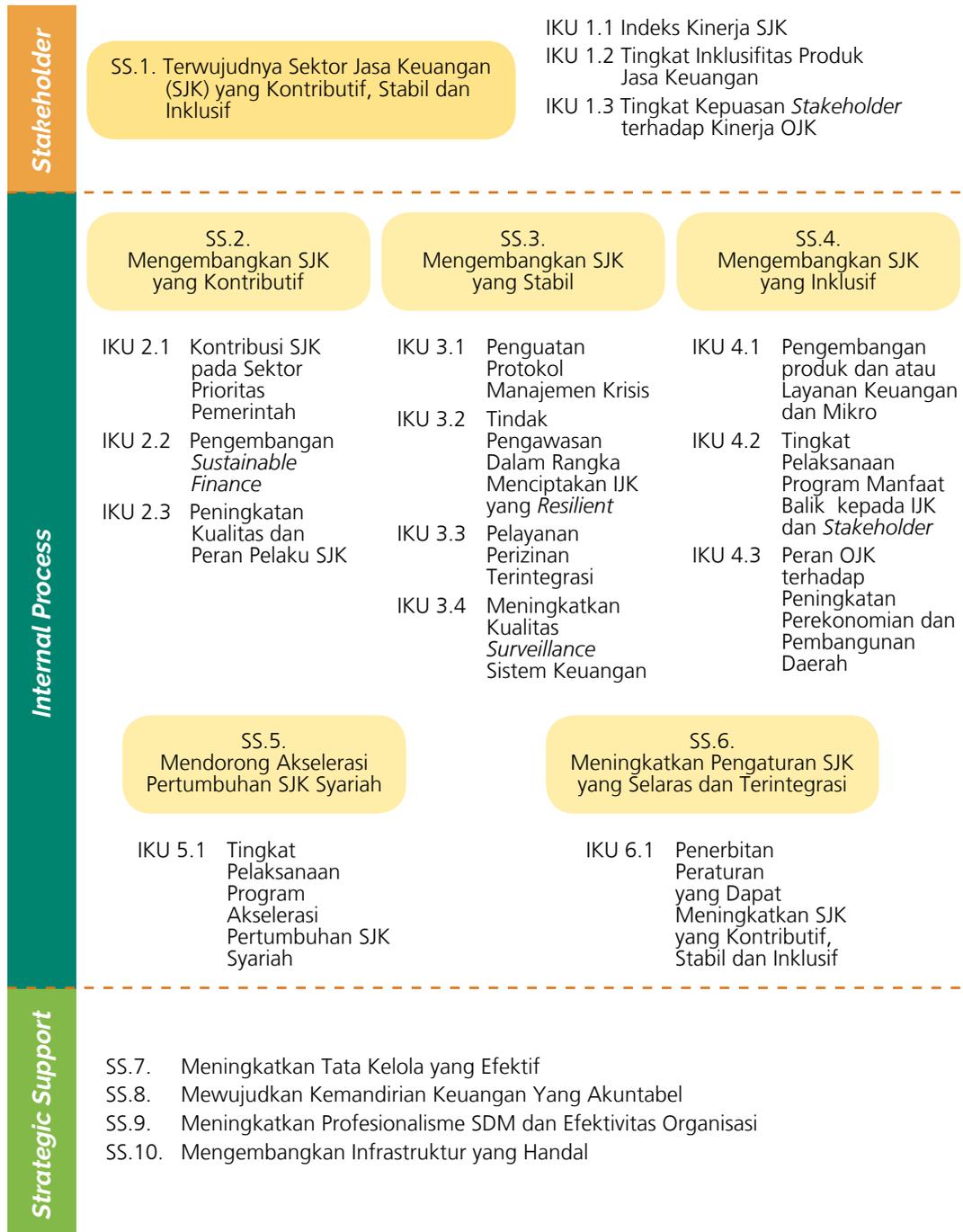


Evaluasi Pelaksanaan Strategi OJK

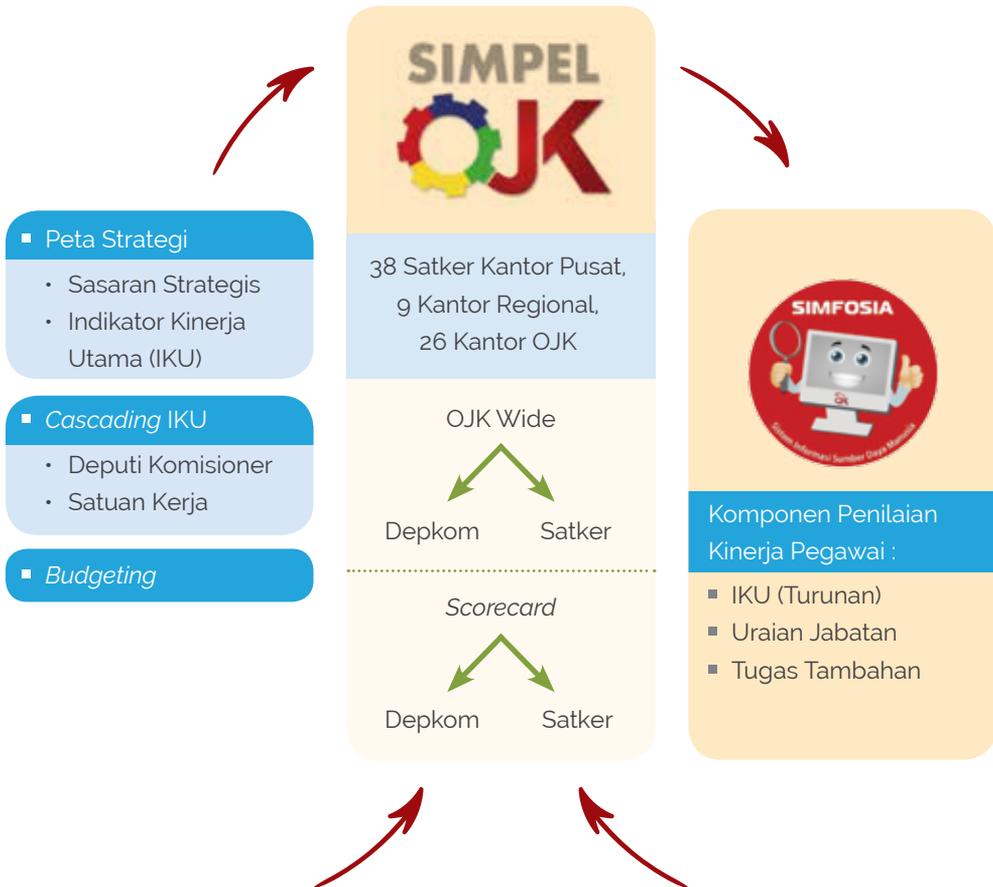
- ◆ *Strategic Review*: Evaluasi atas pelaksanaan *Strategy Map* dan Inisiatif Strategis
- ◆ *Operational Review*: Evaluasi atas pelaksanaan *Strategy Map* Satuan Kerja

Pelaksanaan & Monitoring Strategi

- ◆ Pelaksanaan *Strategy Map*
- ◆ *Monitoring* pelaksanaan *Strategy Map* dan Inisiatif Strategis secara periodik



Penilaian Kinerja Organisasi dan Individual





Perbandingan Pencapaian Kinerja OJK 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Scorecard Kinerja SS & IKU	100,75%	103,86%	104,68%	105,07%	105,98%
Penyerapan Anggaran	63,5%	82,7%	77%	90,65%	96,04%
POJK Terbit	5	39	50 (Termasuk Konversi)	59 (Termasuk Konversi)	79 (Termasuk Konversi)
Pembangunan Aplikasi & Sistem	5	34	47	45	45
Predikat Laporan Keuangan*)	-	WTP	WTP	WTP	WTP
Survei Kinerja Eksternal	4,26 (Skala 6)	4,32 (Skala 6)	4,48 (Skala 6)	4,52 (Skala 6)	4,71 (Skala 6)

*) Laporan Keuangan mengacu pada Tahun Anggaran Y-1



Outlook
**Sektor Jasa
Keuangan 2018**



Halaman ini sengaja dikosongkan

- Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan menguat di tahun 2018. Perbaikan pertumbuhan ini turut didukung oleh *upturn* di negara-negara maju maupun berkembang, serta membaiknya kinerja perdagangan global.
- Perekonomian Indonesia tahun 2018 juga diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2017, sejalan dengan tren perbaikan indikator-indikator sektor riil. Membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik pada 2018 turut didukung oleh membaiknya kinerja investasi dan kinerja ekspor.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global				Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia			
Lembaga	2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Lembaga	2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018
	2,4%	2,7%	2,9%			5,1%	5,3%
	3,2%	3,6%	3,7%			5,1%	5,3%
	3,1%	3,6%	3,7%		5,02%	5,1%	5,3%
						5,1%	5,3%
						5,1%	5,3%





Outlook Sektor Jasa Keuangan

- Kinerja intermediasi perbankan akan kembali pulih seiring perbaikan ekonomi yang terjadi. Kredit dan DPK perbankan diperkirakan tumbuh di kisaran 10-12% di tahun 2018.
- Pertumbuhan kredit mulai bergerak gradual menyamai pertumbuhan DPK setelah tumbuh di bawah DPK pada dua tahun sebelumnya.

%yoy	2016		2017F		2018F	
	Kredit	DPK	Kredit	DPK	Kredit	DPK
OJK	7,87%	9,60%	7% - 9%*	8% - 10%*	10% - 12%	10% - 12%
BI			8% - 10%	9% - 11%	10% - 12%	9% - 11%
LPS			9,20%	7,20%	10%	7,60%

* Hasil nowcasting outlook 2017

% yoy	2017F	2018F
Perbankan	9% - 11%	10% - 12%
Asuransi Jiwa	11% - 13%	12% - 14%
Asuransi Umum	5% - 7%	7% - 9%
Perusahaan Pembiayaan	9% - 11%	9% - 11%
Dana Pensiun DPPK	8% - 10%	7% - 9%
Dana Pensiun DPLK	16% - 18%	15% - 17%



Fokus
OJK 2018



Halaman ini sengaja dikosongkan

Stakeholder and Financial	<p>SS.1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel</p> <p>IKU 1.1 Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja OJK</p> <p>IKU 1.2 Indeks Integritas</p> <p>IKU 1.3 Pengelolaan Keuangan yang Handal</p>	<p>SS.2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan</p> <p>IKU 2.1 Indeks Kinerja SJK</p> <p>IKU 2.2 Indeks Inklusi Keuangan</p>
Internal Process	<p>SS.3. Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing</p> <p>IKU 3.1 Penguatan Pengawasan OJK</p> <p>IKU 3.2 Peningkatan SLA Pelayanan SJK</p> <p>IKU 3.3 Penguatan <i>Surveillance</i> Stabilitas Sistem Keuangan</p> <p>IKU 3.4 Pendalaman Pasar Keuangan</p> <p>IKU 3.5 Penerapan <i>Best Fit International Standard</i></p>	<p>SS.4. Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan</p> <p>IKU 4.1 Peningkatan Kontribusi SJK pada Sektor Ekonomi Prioritas</p> <p>IKU 4.2 Peningkatan Kontribusi SJK bagi Pembangunan Daerah</p> <p>IKU 4.3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku SJK</p>
Strategic Support	<p>SS.5. Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel</p> <p>IKU 5.1 Perlindungan Konsumen yang Kredibel</p> <p>IKU 5.2 Peningkatan Produk Keuangan Mikro</p> <p>IKU 5.3 Optimalisasi Pemanfaatan <i>Fintech</i></p>	<p>SS.6. Mewujudkan Ekonomi Syariah Melalui Peningkatan Keuangan Syariah</p> <p>IKU 6.1 Pelaksanaan Program Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah</p>
Strategic Support	<p>SS.7. Mewujudkan Tata Kelola dan Komunikasi yang Kredibel</p> <p>IKU 7.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola</p> <p>IKU 7.2 Penguatan Peran OJK dalam Hubungan Internasional</p> <p>IKU 7.3 Penguatan Koordinasi dengan Otoritas Fiskal dan Moneter</p>	<p>SS.8. Mewujudkan Kapasitas Organisasi yang Handal</p> <p>IKU 8.1 Penguatan Kapasitas SDM</p> <p>IKU 8.2 Penguatan Kultur untuk Mendukung Organisasi yang Efektif dan Efisien</p> <p>IKU 8.3 Penguatan Otomasi Proses Bisnis</p>



PILAR I



Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil, Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan

- 1** Mengembangkan dan melaksanakan pengawasan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi (*IT Based Supervision*)
- 2** Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan
- 3** Mengimplementasikan standar internasional prudensial yang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional (*best fit*)
- 4** Reformasi IKNB untuk mewujudkan IKNB yang kuat dan berdaya saing
- 5** Efisiensi di industri jasa keuangan untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing

PILAR II



Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan

- 6** Mengoptimalkan peran *financial technology* melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai
- 7** Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan
- 8** Revitalisasi pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang



Penguatan organisasi dan kapasitas SDM



Efektifitas pengelolaan keuangan OJK



Kemandirian gedung baik di kantor pusat maupun di KR/KOJK

PILAR III



Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Handal untuk Mendukung Terciptanya Keuangan Inklusif

- 9** Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan
- 10** Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen

FONDASI INTERNAL



Mewujudkan Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel didukung Kapasitas Internal yang Handal



Optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi



Komunikasi domestik dan internasional



Pengembangan riset sektor jasa keuangan

Untuk mempercepat pencapaian Sasaran Strategis tersebut, maka terdapat 6 Inisiatif Strategis OJK yang bersifat lintas sektoral, strategis dan berdampak luas pada stakeholder.

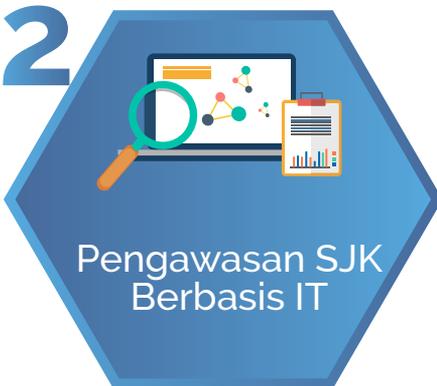


Detail Kegiatan Utama Inisiatif Strategis 2018



Kegiatan Utama/Deliverables :

1. POJK Inovasi Keuangan Digital
2. *Roadmap* Inovasi Keuangan Digital
3. *Regulatory Sandboxing*
4. Pembentukan *National Fintech Center* dan *Innovation Hub*
5. Peningkatan *awareness* sektor jasa keuangan terkait *fintech*



Kegiatan Utama/Deliverables :

1. Penguatan sistem informasi pengawasan SJK berbasis TI melalui pengembangan infrastruktur sistem informasi yang handal
 - a) Pembangunan *repository data*,
 - b) *Enterprise Data Warehouse*,
 - c) Aplikasi dan akses data
2. Penyempurnaan proses bisnis, ketentuan, dan SPO pengawasan SJK.



Kegiatan Utama/Deliverables :

1. *Dashboard* capaian *Market Development Project* Pasar Modal (MDPPM)
2. *Dashboard* Pelaksanaan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SNP3K)
3. Penciptaan produk investasi pasar modal sesuai kebutuhan pasar
4. Penguatan intermediasi dan kelembagaan Pasar Modal
5. Perluasan Basis investor domestik dan internasional
6. Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal yang Efisien dan Kredibel



Kegiatan Utama/Deliverables :

Pengembangan Arsitektur IKNB terkait empat aspek antara lain :

1. Peraturan Perundangan
2. Pengawasan
3. *Market*;
4. Perlindungan Konsumen



Kegiatan Utama/Deliverables :

1. Penyusunan Laporan Keuangan OJK
2. Penerapan *Performance Based Budgeting*
3. Penyempurnaan Proses Pembukuan Perpajakan OJK
4. Pengembangan *Management Information System*
5. Bisnis Proses Manajemen Keuangan



Kegiatan Utama/Deliverables :

1. *Business process reengineering*:
 - a) Perijinan Terintegrasi;
 - b) Desain dan Standarisasi Proses Bisnis OJK ;
 - c) *Digital Office*;
 - d) *Rule Making Rule Process*;
 - e) Proses Pengadaan Barang/Jasa (*E-procurement*);
2. Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Aplikasi untuk Otomasi Proses Bisnis;
3. Rekomendasi Organisasi dan SDM



Halaman ini sengaja dikosongkan